



BADAN POM

BALAI BESAR POM di PADANG
Wilayah Bebas Korupsi
Menuju
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH [LAKIP] TW I 2021

www.bbpompadang.id



padang.pom.go.id



BPOM Mobile



@bbpom_padang



@bbpomdi Padang



bbpom_padang



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan anugerah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Triwulan I Tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.



Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan I Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sasaran dan target kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja *input*, *output*, dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Triwulan I Tahun 2021.

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada Triwulan berikutnya.

Padang, 19 April 2021

**Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Padang**

Firdaus Umar, S.Si, Apt.

TIM PENYUSUN



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

NOMOR HK.02.02.93.931.02.20.190 TANGGAL 11 DESEMBER 2020

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PADANG**

Penanggungjawab : Firdaus Umar, S.Si., Apt.
Ketua : Elyunaida, S.Si., Apt., M.Farm
Sekretaris : Vera Sribanon, S.Si., Apt.

Koordinator : Dra. Meilifa, Apt., M. Si
Dra. Hilda Murni, Apt., MM
Dra. Fifiyani
Dra. Patria Dehelen, Apt.
Drs. Asrianto, Apt., M.M.
Iswadi, S.Farm., Apt.

ANGGOTA :

1. Dra. Armawati Anwar, Apt
2. Dra. Ernasetti, Apt
3. Feri Jonius.S.Si.,M.Si
4. Ardoni, S. Sos
5. Aria Bogorianti Asgul, S. Si, Apt
6. Yelvina, S.Si, Apt
7. Linda Gusriani Fadri, S. Si, Apt, M. Farm
8. Sri Hartati, S. Farm, Apt
9. Nery Revisa, S.E.
10. Ahmad Ridha, SKM.
11. Fitria, S.Si., Apt.
12. Hidrah Lisa Putra, S.Farm., Apt.
13. Leli Oktavia, S.Farm., Apt
14. Novita Normasari, S.Si., Apt., M.P.H.
15. Nining Tridilla Swesty, S.Farm, Apt
16. Rio Mardion, SH
17. ThuDessy Cameryta, Apt., M.Farm
18. Mega Asriati Putri, S.Farm., Apt
19. Hilda Novita, S.H.
20. Nining, S.Farm., Apt
21. Elza Frasi Yuni, S.Farm., Apt.
22. Fikri Ikhsan, S.E.

EDITOR :

1. Yuni Tri Wahyuni, S.Kom.
2. Billy Tunarto, S. Kom
3. Ade Restu Pahlawan, S. Kom

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	i
Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	ix
Ringkasan Eksekutif	x
Highlight	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	4
1.4 ISU STRATEGIS	6
1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	11
1.6 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	18
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2020	32
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	32
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	34
2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	37

BAB III

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	40
3.1.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan I	44
3.1.2 Pencapaian Sasaran Kegiatan II	58
3.1.3 Pencapaian Sasaran Kegiatan III	59
3.1.4 Pencapaian Sasaran Kegiatan IV	59
3.1.5 Pencapaian Sasaran Kegiatan V	79
3.1.6 Pencapaian Sasaran Kegiatan VI	84
3.1.7 Pencapaian Sasaran Kegiatan VII	91
3.1.8 Pencapaian Sasaran Kegiatan VIII	93
3.1.9 Pencapaian Sasaran Kegiatan IX	94
3.1.10 Pencapaian Sasaran Kegiatan X	94
3.1.11 Pencapaian Sasaran Kegiatan XI	95
3.2 REALISASI ANGGARAN	96
3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	100

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN	103
4.2 RENCANA PERBAIKAN KINERJA	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan	6
Gambar 1.3	Peta Wilayah Sumatera Barat	15
Gambar 2.1	Peta Strategi Level 0 Kepala BPOM RI	18
Gambar 2.2	Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19
Gambar 2.3	Peta Strategi Level 2 Loka POM	19
Gambar 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2021	43
Gambar 3.2	Jumlah Sampel Obat Acak MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021	45
Gambar 3.3	Jumlah Sampel Obat Tradisional Acak MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021	46
Gambar 3.4	Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan Acak MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021	46
Gambar 3.5	Jumlah Sampel Kosmetik Acak MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021	47
Gambar 3.6	Jumlah Sampel Obat Acak (Terapetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021	47
Gambar 3.7	Sampel Makanan Acak MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021	49
Gambar 3.8	Jumlah Sampel Obat Targeted MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021	50
Gambar 3.9	Jumlah Sampel Obat Tradisional Targeted MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021	51
Gambar 3.10	Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan Targeted MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021	51
Gambar 3.11	Jumlah Sampel Kosmetik Targeted MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021	
Gambar 3.12	Jumlah Sampel Obat Targeted (Terapetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021	51
Gambar 3.13	Jumlah Sampel Makanan Targeted MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021	54
Gambar 3.14	Persentase Keputusan Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Triwulan I Tahun 2021	61
Gambar 3.15	Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Pusat yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Triwulan I Tahun 2021	61

Gambar 3.16	Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Pusat dan UPT Lain Triwulan I Tahun 2021	62
Gambar 3.17	Persentase Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan Terkait yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Triwulan I Tahun 2021	62
Gambar 3.18	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Triwulan I Tahun 2021	65
Gambar 3.19	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Triwulan I Tahun 2021	66
Gambar 3.20	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2021	69
Gambar 3.21	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2021	73
Gambar 3.22	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2021	76
Gambar 3.23	Jumlah Sampel Obat Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2021	85
Gambar 3.24	Jumlah Sampel Makanan Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2021	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Umur	11
Tabel 1.2	Profil SDM Berdasarkan Golongan	12
Tabel 1.3	Profil SDM Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 1.4	Tabel Jumlah Sarana Distribusi dan Sarana Produksi Obat dan Makanan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16
Tabel 2.1	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	30
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran. 2021	33
Tabel 2.3	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM Di Padang	34
Tabel 2.4	Kriteria Pencapaian Indikator	39
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2021	40
Tabel 3.2	Perbandingan target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama Triwulan I Tahun 2021	43
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I.	44
Tabel 3.4	Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan I tahun 2021	45
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2021	48
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2021	50
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2021	53
Tabel 3.8	Capaian Sasaran Kegiatan ke IV	60
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan I Tahun 2021 2020	65
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2021	68
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2021	72

Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2021	75
Tabel 3.13	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V	79
Tabel 3.14	Capaian Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I Tahun 2021	79
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2021	81
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan I Tahun 2021	82
Tabel 3.17	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI	84
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2021	84
Tabel 3.19	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2021	88
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2021	91
Tabel 3.21	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan I Tahun 2021	95
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja sampai TW I Tahun 2021	96
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran per Output triwulan I Tahun 2021	97
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis TW I Tahun 2021	98
Tabel 3.25	Nilai efisiensi sasaran kegiatan Triwulan I Tahun 2021	102



DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan 2021
2. Perjanjian Kinerja 2021
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021
4. Nilai Pencapaian Sasaran Tahun 2021
5. Capaian RAPK Balai Besar POM di Padang Tahun 2021
6. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Tahun 2021



RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawas produk obat dan makanan untuk mewujudkan visi dan misi BPOM. Hasil kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang selama Triwulan I Tahun 2021 telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan pada rencana strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang periode tahun 2020-2024.

Capaian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020 diwujudkan dalam 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2020. Kesebelas sasaran kegiatan tersebut adalah:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (NPS) 105,43 (baik).
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (capaian dihitung pada akhir tahun).
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang (capaian dihitung pada akhir tahun).
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (NPS) 101,19 (baik)
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (NPS) 120 (sangat baik)
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (NPS) 104,02 (baik).
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (NPS) 119,80 (sangat baik).

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal, (capaian dihitung pada akhir tahun).
9. Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal,(capaian dihitung pada akhir tahun).
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan(capaian dihitung pada akhir tahun).
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel(capaian dihitung pada akhir tahun).

Dari kesebelas sasaran kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020 memiliki 3 (tiga) sasaran dengan kriteria baik, 2 (dua) sasaran dengan kriteria sangat baik, 6 sasaran belum dapat dihitung karena pencapaian dihitung di akhir tahun. Pencapaian kesebelas sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 28 indikator kinerja.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 11 (sebelas) sasaran kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan telah menyerap anggaran DIPA Balai Besar POM di Padang sampai tanggal 31 Maret tahun 2021 sebesar Rp.5,505,199,640,-(Lima milyar lima ratus lima juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau 11,99% dari total pagu anggaran sebesar Rp.45,920,455,000 (Empat puluh lima milyar Sembilan ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dari perhitungan efisiensi penggunaan anggaran apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian target *output*, kegiatan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang belum efisien dengan nilai efisiensi 80%

BBPOM DI PADANG RAIH PENGHARGAAN SATKER PARTISIPASI TERBAIK TAHUN 2020 DARI KPPN PADANG



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Partisipasi Terbaik Tahun 2020 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang (Selasa, 16/02/21). Kepala BBPOM di Padang, Firdaus Umar menerima langsung penghargaan tersebut dari Kepala Kantor KPPN Padang, Tisari Yona Geumila. Selain BBPOM di Padang, beberapa satker lingkup kerja KPPN Padang juga menerima penghargaan tersebut baik instansi vertikal maupun pemerintah daerah.

Acara dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho. Dalam sambutannya, Heru menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan evaluasi dan peningkatan pemahaman mengenai isu-isu terkini pelaksanaan anggaran Tahun 2021. Selain pemberian penghargaan Satker Berprestasi, juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas di wilayah kerja KPPN Padang Tahun 2021 serta Evaluasi dan Strategi Pelaksanaan Anggaran.



Pada kegiatan tersebut juga di sampaikan beberapa materi diantaranya materi tentang Kebijakan SBM Tahun 2021 yang di sampaikan oleh Heru Pudyo Nugroho. Dilanjutkan dengan materi Kebijakan Perpajakan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi (Kanwil DJP Sumbarja), Lindawaty. Acara ditutup dengan Evaluasi dan Strategi Pelaksanaan oleh Kepala Kantor KPPN Padang, Tisari Yona Geumila.

Firdaus Umar berharap BBPOM di Padang tidak boleh lengah dengan penghargaan tersebut, tetapi justru terus meningkatkan kinerja nya. Terutama dalam meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

BBPOM di Padang Turut Mensukseskan Program Vaksinasi Covid 19 di Sumatra Barat

Dalam rangka percepatan penanggulangan dan memutus mata rantai penularan pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19), pemerintah perlu melaksanakan vaksinasi Covid 19, untuk meningkatkan kekebalan individu dan menjaga kesehatan masyarakat. Badan POM sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam pengawasan peredaran obat dan makanan, turut serta dalam percepatan penanggulangan pandemi Covid 19 ini, dengan cara pengawasan dan pendampingan distribusi vaksin Covid 19 untuk memastikan mutu, khasiat dan keamanan vaksin masih. Karena vaksin merupakan produk rantai dingin yang sangat rentan terjadi kerusakan apabila disimpan pada suhu yang tidak sesuai persyaratan.

Balai Besar POM di Padang sebagai UPT Badan POM di Sumatra Barat juga turut andil dalam mensukseskan program Badan POM dalam pengawasan dan pendampingan distribusi vaksin Covid 19 di wilayah Sumatra Barat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:



1. Koordinasi ke Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota dan Dinas Kesehatan di wilayah Provinsi Sumatra Barat pada minggu pertama bulan Januari.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan tempat penyimpanan vaksin Covid 19 sesuai dengan persyaratan mutu.

2. Pengawasan dan pendampingan distribusi vaksin Covid 19 dari Instalasi Farmasi Provinsi Sumatra Barat ke Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota.

Vaksin Covid 19 didistribusikan dari Biofarma Bandung ke Instalasi Farmasi Provinsi Sumatra Barat, setelah itu di distribusikan ke Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota. Petugas Badan POM berkoordinasi dengan petugas IFP/ IFK dalam memastikan suhu pengiriman masih berada dalam range suhu penyimpanan vaksin. Sampai akhir Maret 2021, program vaksinasi telah berjalan 2 tahap, tahap pertama untuk petugas yang bekerja di sarana medis dan tahap kedua untuk petugas layanan publik dan lansia.



3. Intensifikasi Pengawasan Puskesmas sebagai Dukungan Program Vaksinasi Covid 19.

Puskesmas adalah sarana distribusi vaksin Covid 19 yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang akan divaksin. Untuk itu petugas Balai Besar POM di Padang turut mengawasi distribusi vaksin Covid 19 di Puskesmas, baik memeriksa kesiapan tempat penyimpanan vaksin dan juga kesiapan personil.

BBPOM di Padang berhasil Menghentikan peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di kota Padang

Balai Besar POM di Padang pada tanggal 23 Maret 2021 telah berhasil menghentikan kegiatan penjualan/peredaran obat tradisional Tanpa Izin Edar di wilayah kota Padang melalui kegiatan Penindakan. Petugas menemukan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat yang siap untuk dijual oleh pelaku pada sebuah Toko di Padang yang kemudian produk tersebut disita oleh PPNS BBPOM di Padang.



Saat pelaksanaan Operasi Penindakan, petugas BBPOM di Padang didampingi oleh Korwas PPNS Polda Sumbar dan Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar. Pelaku disangkakan melanggar pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat karena tidak terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya.

BBPOM di Padang Gandeng Pengusaha Retail Dalam Pengawasan Obat Dan Makanan

Balai Besar POM di Padang menjalin kesepakatan dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) Sumatera Barat dalam rangka pembinaan dan pengawasan produk obat dan makanan. Pertemuan dilaksanakan di aula Balai Besar POM di Padang (Senin, 18/01), dihadiri Kepala Balai Besar POM di Padang dan Ketua APRINDO Sumatera Barat; pengurus DPD APRINDO; dan beberapa staf Balai Besar POM di Padang..



Pada pertemuan ini telah disepakati bahwa Balai Besar POM di Padang dan APRINDO Sumatera Barat akan melaksanakan beberapa kegiatan dan aksi bersama yang telah dituangkan dalam Draft Perjanjian Kerjasama. Selain itu, setiap kegiatan nantinya akan melibatkan pihak terkait lainnya baik instansi pemerintah maupun swasta agar kegiatan yang dilaksanakan benar – benar dapat menyentuh masyarakat Sumatera Barat.

AUDIENSI KEAMANAN PANGAN TERPADU

Pelaksanaan Audiensi di beberapa kabupaten/ Kota di Sumatera Barat antara lain Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Lima Puluh Kota di bulan Februari 2021. Program Keamanan Pangan Terpadu mendapat sambutan baik serta dukungan dari Pemerintahan Daerah setempat dalam bentuk Kesepakatan Bersama tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan.



Kegiatan Advokasi peyampaian program kegiatan Terpadu keamanan pangan yang akan dilaksanakan.

Pada kesempatan Kegiatan Advokasi Kepala BBPOM di Padang Menyampaikan Apresiasi dan Ucapan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kota Pariaman terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus yang mendapat Peringkat I (Satu) di Sumatera Barat dalam hal pencairan Dana DAK (95.6%) dan peringkat IV di tingkat nasional dari 319 Kabupaten kota



BBPOM DI PADANG LAKUKAN SURVEY PASAR DI KOTA SAWALUNTO



BBPOM di Padang berkoordinasi dengan Pengelola Pasar Sawahlunto, Hariswandi dan Gusrizal, Rabu 24 Maret 2021,

Survey Pasar bertujuan melakukan pemetaan dan identifikasi pasar untuk pengendalian bahan berbahaya dan identifikasi pedagang pasar

serta inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya yang beredar di masyarakat, dan mendorong pengelola pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar. Kepada para pedagang yang disurvei diberikan Edukasi Cek Klik dan cinderamata berupa paket informasi keamanan pangan.



BBPOM DI PADANG JANGKAU NAGARI SITUJUAH BATUA DALAM BIMTEK KORLAP DAN KKPD

BBPOM di Padang pada hari Rabu (31/3) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Koodinator lapangan dan Kader Keamanan Pangan Desa yang dihadiri 24



orang kader bertempat di aula Nagari Situjuah batua Kabupaten Lima Puluh Kota.



kegiatan ini dilaksanakan dengan penyampaian Materi Oleh Petugas BBPOM di Padang yaitu 5 Kuci keamanan Pangan dan Simulasi Penggunaan Rapid test Kit kepada Para Kader

Harapannya, kader keamanan pangan desa diharapkan dapat membantu masyarakat Desa terbebas dari masalah kesehatan akibat pangan yang tidak aman serta persoalan stunting dengan penyediaan pangan yang aman, bermutu.

Penyebaran Informasi Keamanan Pangan Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan



BBPOM di Padang mengadakan kegiatan Penyebaran Informasi Keamanan Pangan dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan bagi pedagang ritel pangan di pasar tradisional dan pedagang pangan siap saji (Rabu, 10/03) di hotel Bunda Padang yang dibuka oleh Koordinator Substansi Infokom, Fifiyani dan dihadiri 30 peserta yang berasal dari Pedagang Pasar di Kota Padang, Petugas Pasar Raya Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang

dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pada kegiatan ini dipaparkan materi lima kunci keamanan pangan dan simulasi penggunaan aplikasi BPOM Mobile dengan selalu CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluarsa) agar memastikan produk pangan terkemas yang dijual aman sampai ke tangan konsumen

ADVOKASI KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL TERPADU DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

Lebih dari 10 OPD Kabupaten lima puluh kota berpartisipasi aktif dalam melaksanakan Advokasi Kegiatan Prioritas Nasional Terpadu Desa Pangan Aman yang diadakan di oleh BBPOM dipadang tanggal 30 Maret 2021 di Hotel Shago Bungsu 2 Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan ibu Fitma Indrayani dan dihadiri oleh lintas sektor terkait diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Pangan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan (Bapelitbang), Camat, Lurah, Walinagari dan calon kader keamanan pangan.



Dalam pertemuan ini dilakukan penandatanganan komitmen keamanan pangan terpadu oleh Bupati Lima Puluh Kota yang diwakili oleh Asisten II dan pemilihan Desa, Pasar dan sekolah terpilih untuk diintervensi dan dilanjutkan dengan pemaparan materi secara daring melalui Zoom Meeting oleh Koordinator Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Direktorat PMPU dan secara luring dipaparkan oleh OPD terkait.

Dengan terlaksananya kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Terpadu ini menjadi momentum awal pelaksanaan intervensi keamanan pangan terpadu untuk menciptakan Kota Pangan Aman di Kabupaten Lima Puluh Kota

Laboratorium Balai Besar POM di Padang mengadakan kegiatan In House Training (IHT) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) laboratorium Manajemen Limbah B3 tanggal 8 dan 9 Maret 2021 di salah satu hotel di Padang . Kegiatan ini diikuti oleh staff Laboratorium BBPOM di Padang, UPTD Balai Labkesda Propinsi Sumbar, Balai Laboratorium Peminaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Padang, Balai Riset dan Standarisasi Industri (Baristand) Padang, UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP) Sumatera Barat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas Laboratorium tentang pentingnya menjaga K3 , dan menangani limbah B3 sehingga bisa terhindar dari permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja.



SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI PANGAN OLAHAN DALAM RANGKA JEMPUT BOLA REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Loka POM di Kota Payakumbuh berkolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan mengadakan acara Sosialisasi dan Desk Registrasi Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan. Acara tersebut dilaksanakan selama dua hari pada Senin, 22 Maret 2021 hingga Selasa, 23 Maret 2021. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam acara tersebut antara lain Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan yang dilaksanakan pada hari pertama dan Desk Registrasi Pangan Olahan pada hari kedua. Acara dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Loka POM di Kota Payakumbuh.

Pelaksanaan kegiatan hari pertama dihadiri oleh perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Payakumbuh, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh, serta 30 orang Pelaku Usaha. Pelaku usaha yang hadir merupakan pelaku usaha yang sedang dalam proses pengurusan izin edar di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh yaitu Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi dan Kab. Agam. dalam kegiatan ini peserta dibekali pengetahuan mengenai Teknis dan tahap Penilaian Pemeriksaan Sarana oleh Balai (PSB), Tata Cara Pengurusan Izin Usaha ke DPM-PTSP, Pengetahuan terkait Pangan Olahan serta Tata Cara Registrasi Pangan Olahan secara online.

Kegiatan hari kedua dilanjutkan dengan pendampingan 10 pelaku usaha yang sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin edar melalui desk registrasi. Pelaku usaha didampingi dan dibantu untuk melakukan pendaftaran akun dan izin edar produk pangan olahan secara online oleh panitia yang berasal dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Staf Loka POM di Kota Payakumbuh. Dari kegiatan ini diperoleh sebanyak 8 akun perusahaan terdaftar, dan sebanyak 13 produk pangan berhasil memiliki Nomor Izin Edar (NIE). Penyerahan NIE secara simbolis kepada pelaku usaha dilakukan oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz bersama Kepala Loka POM di Kota Payakumbuh, Iswadi serta Koordinator Registrasi Pangan Olahan Resiko Rendah Badan POM, Adrianti. Dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Payakumbuh juga menyampaikan dukungannya terhadap Badan POM dan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan mengurus izin edar produk pangan olahannya. Rangkaian kegiatan tersebut juga diliput oleh media cetak maupun elektronik serta disiarkan secara live di radio.



Penyebaran Informasi Keamanan Pangan dan Pendampingan UMKM Pangan dalam Rangka Izin Edar BPOM

Kamis, 25 Maret 2021, Loka POM di Kab. Dharmasraya melaksanakan kegiatan Penyebaran Informasi di Aula Dinas PUPR Kab. Sijunjung. Kegiatan ini dihadiri oleh Ibu Bupati Kab. Sijunjung selaku Ketua Dekranasda Kab. Sijunjung, Kepala Bidang Perdagangan Koperindag serta 30 orang peserta pelaku usaha UMKM Pangan.

Materi yang disampaikan oleh narasumber yaitu Kepala Loka POM di Kab. Dharmasraya tentang Keamanan Pangan serta proses registrasi MD untuk pangan olahan.



BAB I

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Padang Triwulan I Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan I Tahun 2021 yang merupakan tahun kedua Renstra Balai Besar POM di Padang 2020-2024 dan dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana strategis dan Perjanjian Kinerja termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam rnencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/ Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja performance (GAP) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, pada penyusunan Laporan kinerja, harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun jujur, obyektif, akurat, dan transparan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP

diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja pada level instansi/ Unit Kerja Eselon I/ Satuan Kerja harus melaporkan kinerjanya. Hal ini mengingat tujuan Pelaporan Kinerja adalah .

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Manfaat dari Laporan Kinerja adalah untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia, BPOM dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM diatur sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang telah mengalami perubahan dari peraturan Nomor 29 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Untuk membantu pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat selain Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis yaitu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Dharmasraya.

Wilayah pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota dengan pembagian wilayah kerja pengawasan obat dan makanan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang meliputi 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok.

Untuk 6 (enam) Kabupaten/Kota lainnya menjadi wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan yaitu:

1. **Loka Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh**, dengan wilayah kerja Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. **Loka Pengawas Obat dan Makanan di Dharmasraya**, dengan wilayah kerja Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas: Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing – masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan *sampling* Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;

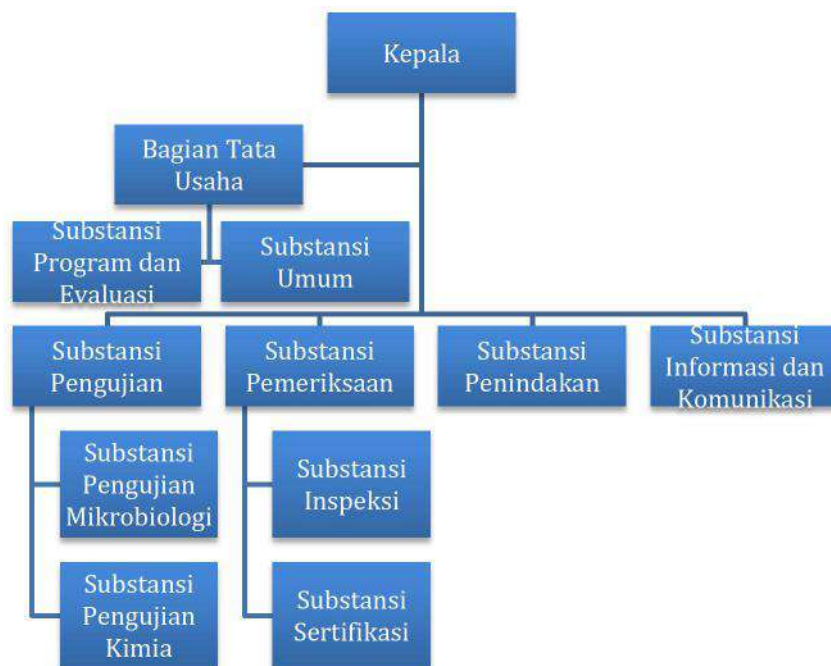
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang adalah sebagai berikut :

Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional





Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Sesuai dengan struktur organisasi, kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan, kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi Pratama, jabatan

Administrator dan jabatan pengawas masing-masing. Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing

STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan

Tugas Loka Pengawas Obat dan Makanan adalah Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4 ISU STRATEGIS

1. Pandemic Covid-19

Belum banyak pengetahuan valid tentang pandemic virus corona yang menjadi penyebab salah satu dampak kematian ekstrim di berbagai negara. Penyebaran virus corona menjadi ancaman serius bagi dunia sejak pertama dilaporkan akhir 2019 yang telah menginfeksi lebih dari satu per empat juta orang. Perlu diketahui bahwa virus corona bukanlah flu biasa. Virus corona menyebabkan penyakit dengan gejala yang berbeda, menyebar dan membunuh lebih mudah serta berasal dari virus yang sangat berbeda dengan penyebab flu biasa.

Pandemi virus Corona (COVID-19) dengan penyebaran yang masif, membuat sebagian besar masyarakat di dunia tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Itu membuat banyak orang bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berakhir. Dalam menyikapi pandemic ini Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis dalam rangka mempercepat penanggulangan wabah Covid-19 dimulai dari Pembentukan gugus tugas

Covid-19 secara Nasional dan berjenjang sampai dengan kebijakan *refocusing* anggaran dan kegiatan di tingkat kementerian lembaga sampai pada tingkat pemerintahan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia melakukan tindakan cepat dengan mengeluarkan Surat Edaran Percepatan Perubahan anggaran melalui *refocusing* kegiatan terhadap penanganan pandemic covid-19 ini, begitu juga halnya dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dalam menyikapi kebijakan pemerintah tersebut melakukan *refocusing* kegiatan untuk penanggulangan pandemic covid-19 ini khususnya di Sumatera Barat. Adapun bentuk *refocusing* kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang seperti pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, pembuatan Hand Sanitizer serta peningkatan imunitas pegawai.

2. Desktop inspection sarana produksi dan distribusi

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Pandemi Covid-19, Balai Besar POM di Padang menyelenggarakan Sertifikasi *online* Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada sejumlah Pedagang Besar Farmasi di wilayah Sumatera Barat, dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting* atau *whatsapp*. *Desktop inspection* tersebut diikuti oleh petugas inspeksi dan sertifikasi Balai Besar POM di Padang dengan pelaku usaha. Kegiatan ini juga dilaksanakan pada audit sarana dalam rangka sertifikasi pangan olahan dan audit sarana dalam rangka sertifikasi CPOTB. Kegiatan desk inspection dapat diikuti oleh pelaku usaha dengan lancar karena komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan petugas balai serta tersedianya sarana dan prasarana online di wilayah kerja balai Besar POM di Padang.

3. Pengawasan Keamanan dan Mutu Vaksin COVID-19 Sebelum dan Selama Peredaran

Sejak kedatangan vaksin Covid-19 di Indonesia pada 6 Desember 2020 (tahap I) dan 31 Desember 2020 (tahap II), Balai Besar POM di Padang ikut mengawal pendistribusian vaksin Covid-19 sampai ke kabupaten/Kota. Dimulai dari rapat persiapan penerimaan vaksin Covid-19 di Provinsi bersama Dinas terkait, pengecekan sarana distribusi di Provinsi hingga pengecekan sarana distribusi di masing-masing IFK Kabupaten/Kota. Pada proses penerimaan vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang dikirim melewati jalan darat, Balai Besar POM di Padang melakukan pengecekan kesesuaian dokumen serta kesesuaian suhu tempat penyimpanan vaksin CoronaVac. Vaksin CoronaVac yang

diproduksi oleh Sinovac Life Science CO., Ltd, Beijing, China. bekerja sama dengan PT. Bio Farma mendapatkan izin penggunaan dalam kondisi darurat (*Emergency Use Authorization/EUA*) dari Badan POM. Makna dari pemberian *EUA* oleh Badan POM adalah bahwa vaksin tersebut telah melalui serangkaian proses evaluasi yang dilakukan oleh Badan POM bersama dengan para ahli di bidang vaksin terhadap keamanan, khasiat dan mutu vaksin sebelum digunakan oleh masyarakat.

Proses pendistribusian vaksin Covid-19 dilakukan oleh PT Bio Farma ke IFP Provinsi yang selanjutnya akan didistribusikan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui IFK Kabupaten/Kota. Balai Besar POM di Padang secara proaktif memperkuat proses pengawasan distribusi vaksin dengan cara melakukan pengawasan di sarana distribusi IFK masing-masing Kabupaten/Kota guna memastikan mutu vaksin tetap terjaga baik hingga digunakan untuk masyarakat. Hal ini penting karena vaksin merupakan produk yang rentan mengalami kerusakan jika suhu penyaluran dan penyimpanan tidak sesuai persyaratan, yaitu pada suhu 2°C-8°C. Dalam rangka mengawal keamanan vaksin tersebut Balai Besar POM di Padang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan masing-masing Kabupaten/Kota serta Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas dan Komda PP KIPI) untuk melakukan KIPI. Pemantauan dilakukan terhadap pelaporan yang diterima dari tenaga kesehatan atau industri farmasi pemilik vaksin atau masyarakat untuk memastikan keamanan vaksin setelah beredar.

4. Klaim Produk Herbal yang Dapat Menyembuhkan Pasien COVID-19

Sehubungan dengan makin maraknya pemanfaatan produk herbal, khususnya produk yang disetujui klaim khasiat/manfaatnya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh yang kemudian dikaitkan dengan upaya pencegahan dan pengobatan penyakit COVID-19, Badan POM RI memberikan penjelasan bahwa untuk Obat herbal yang telah memiliki Nomor Izin Edar (NIE) Badan POM maka produk tersebut telah dilakukan evaluasi terhadap aspek keamanan, khasiat dan mutunya. Klaim khasiat suatu obat herbal harus dibuktikan, baik berdasarkan data empiris atau secara ilmiah melalui uji pra klinik dan uji klinik. Apabila suatu produk herbal terbukti berkhasiat untuk mengobati suatu penyakit, maka klaim khasiat tersebut akan tertera pada label/desain kemasan produk. Balai Besar POM di Padang telah melakukan pengawasan terhadap produk herbal yang diklaim dapat membantu memelihara daya tahan tubuh yang kemudian dikaitkan dengan upaya pencegahan dan pengobatan penyakit Covid-19. pengawasan dilakukan dengan memantau produk herbal yang beredar di sarana distribusi di wilayah Sumatera Barat dan

memastikan produk herbal yang beredar memiliki Nomor Izin Edar (NIE) sehingga aman dikonsumsi.

5. Balai Besar POM di Padang Terus Dukung Peran Strategis UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Nasional

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam menyediakan kebutuhan untuk masyarakat Indonesia. Peran UMKM ketika ekonomi merosot, kembali terlihat saat Indonesia terkena dampak pandemi Covid-19. UMKM mampu menjadi *bumper* ekonomi dan merupakan pilihan pengalihan sumber daya ekonomi ketika sektor lain cenderung menurun. Peran UMKM yang sangat strategis ini perlu didukung dengan penguatan kapasitas UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas secara konsisten serta aman dikonsumsi oleh masyarakat sehingga dapat bersaing di dunia Internasional.

Pendampingan kepada pelaku usaha di Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Loka Pengawas Obat dan Makanan dengan cara pembinaan langsung ke sarana produksi, bimtek dan pelatihan terhadap pelaku usaha. Juga dilakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan proses produksi serta bimbingan langsung, e-registrasi pada sistem hingga terbitnya izin edar.

Kemitraan Balai Besar POM di Padang dan Loka Pengawas Obat dan Makanan dengan lintas sektor terkait telah ditingkatkan serta pembinaan dan pendampingan terkait dengan proses izin edar dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga pelaku usaha pada akhirnya menghasilkan produk memiliki izin edar yang dapat menjamin mutu, keamanan dan manfaat serta memiliki daya saing yang tinggi.

6. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik bidang kesehatan.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Kebijakan DAK Non Fisik Badan POM merupakan bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dengan luasnya cakupan wilayah pengawasan pangan, jenis pangan yang sangat beragam, terbatasnya kemampuan industri pangan dalam menghasilkan produk pangan yang aman, terutama industri rumah tangga (IRTP) dan rendahnya tingkat kepatuhan fasilitas pelayanan kefarmasian yang sesuai

dengan standar maka diperlukan pengawasan bersama pusat dan daerah untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan cakupan pemeriksaan.

BPOM sebagai koordinator sesuai dengan Inpres No.3 Tahun 2017 dan Permendagri No.41 Tahun 2018 telah melaksanakan program ini. Arah Kebijakan DAK Nonfisik Dana BOK Pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat), Industri Rumah Tangga Pangan serta pengawasan makanan minuman Industri Rumah Tangga (IRT) sesuai standar dan persyaratan. Badan POM telah menyalurkan kepada 12 kabupaten/Kota di Sumatera Barat Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dikawal oleh Balai Besar POM di Padang. Dan berdasarkan hasil evaluasi DAK Non Fisik Bidang Pengawasan Obat dan Makanan TA. 2020 dan hasil self assessment yang dilakukan terhadap 319 Kabupaten/Kota maka terpilih 3 Dinkes yang merupakan 10 Dinkes terbaik Kabupaten/Kota yaitu Kota Pariaman, Pasaman Barat dan Pesisir Selatan. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan fasyanfar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, meningkatkan validitas fasyanfar dan meningkatkan pemahaman tenaga kefarmasian di fasyanfar terhadap standar, persyaratan dan ketentuan terkait pemngelolaan obat. Pada pengawasan pangan akan dapat meningkatkan keamanan dan produk IRTP yang beredar sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestic maupun internasional.

7. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Padang melaksanakan reformasi birokrasi (RB) berpedoman pada SK Menpan RB nomor 25 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sasaran RB 2020-2024 yaitu adalah Birokrasi yang bersih, akuntabel, capable dan pelayanan publik. Pada tahun 2019 BBPOM di Padang meraih penghargaan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Implementasi RB yang dilakukan Balai Besar POM dalam rangka mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Padang terhadap 6 faktor pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, sebagai wujud pembangunan Zona Integritas pada Balai Besar POM di Padang telah berhasil mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah menyusun rencana strategis Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, program, dan kegiatan berikut target *output* yang akan dicapai.

Seiring dengan kebutuhan organisasi, Rencana strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang diselaraskan dengan penguatan kelembagaan BPOM melalui restrukturisasi organisasi. Penguatan kelembagaan BPOM diawali dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang dilanjutkan dengan Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM.

Dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja UPT BPOM, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di provinsi Sumatera Barat.

1.6 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.6.1 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang di dukung dengan sarana prasarana dan sumber daya yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang per 31 Maret 2021 adalah 111 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Umur

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Umur

Umur	Jumlah
20 - 24 Th	1
25 - 29 Th	13
30 - 34 Th	20
35 - 39 Th	20
40 - 44 Th	11
45- 49 Th	13
50 - 60 Th	33
Total	111

b. Golongan

Tabel 1.2. Profil SDM Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	1	1
2.	2	2
3.	4	4
4.	1	1
5.	4	4
6.	19	20
7.	14	14
8.	16	16
9.	26	25
10.	15	16
11.	9	10
Total		111

Tabel 1.3. Profil SDM Berdasarkan Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	13
2.	Apoteker	32
3.	S1 Biologi	2
4.	S1 lain	29
5.	D3	16
6.	SMF	8
7.	SMAK	3
8.	SLTA Umum	7
9.	SLTA Kejuruan	0
10	SLTP	1
Total		111

Untuk mencapai target kinerja dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Trwulan I tahun 2021, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja. Kekurangan tersebut dibantu dengan tenaga PPNPN Sebanyak 39 Orang. Terdiri atas Kelompok Substansi Pengujian 9 (Sembilan) Orang , Kelompok Substansi Pemeriksaan 2 (dua) Orang , Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi 3 (Tiga) Orang, Bagian Tata Usaha terdiri dari 24 (dua puluh empat) Orang dan Kelompok Substansi Penindakan 1 (satu) Orang , Tega PPNPN untuk Loka POM di Kota Payakumbuh 8 (delapan) Orang , dan Loka POM diKab. Dharmasraya 5 (Lima) Orang.

2. Sarana Gedung

Sarana dan Prasarana tanah dan bangunan gedung Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang seluas 3167 m2 sejak tahun 2018 sudah memiliki sertifikat hak milik atas nama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Untuk pengembangan gedung kantor, luas tanah sudah tidak memungkinkan lagi karena masing-masing sisi sudah berbatasan langsung dengan jalan raya dan kantor Pemerintahan Kota Padang. Salah satu solusi pengembangan bangunan Balai Besar POM di Padang adalah dengan renovasi bangunan menjadi bertingkat atau pindah lokasi. Saat ini bangunan kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang digunakan seluas 3186 m2.

Rumah dinas Kepala Balai Besar POM di Padang terletak tidak jauh dari lokasi kantor dengan luas 147,1 m2. Tanah yang digunakan untuk membangun rumah dinas tersebut sejak tahun 2018 juga telah bersertifikat atas nama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

Untuk 2 (dua) UPT yaitu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Dharmasraya yang sejak dibentuk pada bulan September tahun 2018 yang lalu masih menggunakan sarana bangunan dengan status sewa. Sarana dan prasarana Loka POM di Payakumbuh menggunakan gedung kantor pinjaman dari Pemda setempat. Sejak tanggal 4 November 2019 Loka POM di Payakumbuh telah pindah ke lokasi kantor lebih luas yaitu menggunakan bangunan Universitas Andalas dengan status pinjam pakai selama 2 tahun, sedangkan Loka POM di Dharmasraya menggunakan gedung kantor rumah toko dengan status sewa pakai.

3. Sarana Komunikasi dan Informasi

Pada tahun 2011 Balai Besar POM di Padang mendapatkan bantuan infrastruktur TIK dari Pusdatin BPOM salah satunya adalah seperangkat alat *Video Conference* yang digunakan untuk

melakukan *Video Call* dengan BPOM dan Balai Besar POM/Balai POM di seluruh Indonesia sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar.

Setiap tahunnya dilakukan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK di Balai Besar POM di Padang. Peningkatan *e-government* setiap tahun menuntut pekerjaan berbasis teknologi informasi menggunakan beberapa aplikasi/sistem informasi yang dibangun baik oleh internal Balai Besar POM di Padang sendiri ataupun dari eksternal, dan terus di *update*. Hal ini menyebabkan kebutuhan internet pun makin tinggi. Oleh karena itu pada tahun 2017, Balai Besar POM di Padang menambah jaringan internet menggunakan ISP (*Internet Service Provider*) *Speedy Indihome* 100 Mbps.

Pada Tahun 2019, Pusdatin memutus langganan VPN untuk semua BB/BPOM, dan menyerahkan kepada masing-masing BB/BPOM untuk berlangganan internet ke ISP yang tersedia di daerah masing-masing. BBPOM di Padang sendiri memutuskan berlangganan dengan ASTINET (telkom) berkapasitas 10 Mbps dan 1 IP publik. Selain itu Balai Besar POM di Padang juga memiliki beberapa server diantaranya *Proxy Server*, *Storage Server*, *Network Management Sistem (NMS) Server* dan *MRTG Web Server* yang berada di ruang server dan dikelola oleh tim TI Balai Besar POM di Padang.

Selama pandemi, BBPOM di Padang lebih banyak menggunakan aplikasi *zoom meeting* untuk berkomunikasi atau pertemuan dengan BPOM pusat, ataupun stakeholder terkait. Selain itu BBPOM di Padang juga mempunyai media sosial seperti Instagram, twitter, Facebook dan Youtube untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan pada Triwulan I Tahun 2021 BBPOM di Padang membangun aplikasi Galamai (Galeri Layanan Masyarakat dan Informasi) untuk kebutuhan layanan publik agar bisa diakses oleh customer BBPOM di Padang dimana saja dan kapan saja.

4. Sumber Daya Energi

Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 54,7 KVA. Pada tahun 2011 dilakukan penambahan daya listrik menjadi 105 KVA dengan penambahan alat-alat laboratorium dan pada tahun 2012 dinaikkan lagi menjadi 147 KVA. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilengkapi dengan generator dengan kapasitas 100 KVA dan pada tahun 2017 telah ditambah lagi 1 generator dengan kapasitas 150 KVA.

5. Sarana Laboratorium

Balai Besar POM di Padang senantiasa berkomitmen untuk memberikan hasil pengujian laboratorium yang absah, didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana

laboratorium yang memadai, terutama peralatan laboratorium yang merupakan salah satu unsur penunjang utama pengujian selain personil yang kompeten dan metode analisa yang valid. Pada tahun 2021 untuk pemenuhan standar laboratorium direncanakan pengadaan peralatan laboratorium di Balai Besar POM di Padang sebanyak 1 (satu) unit alat pendukung dan 8 (delapan) unit alat utama melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.

6. Pagu Anggaran Tahun 2021

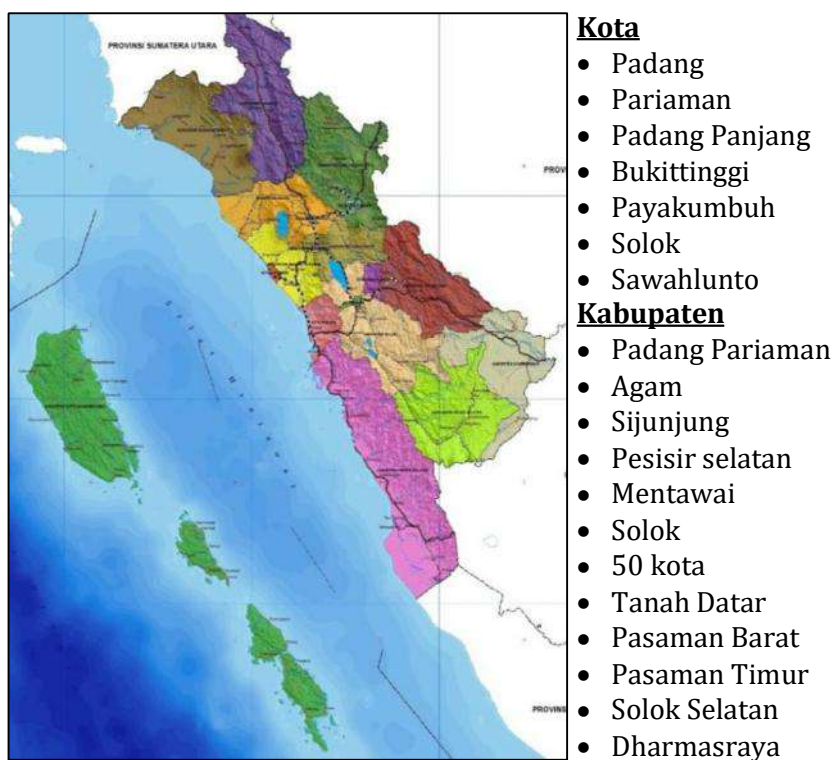
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 yaitu sebesar Rp.45,920,455,000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Rp.17,874,800,000,- Belanja Barang Rp.22,820,905,000,- dan Belanja Modal Rp.5,224,750,000,- dengan realisasi anggaran Rp.5,505,199,640,- atau 11,99%.

1.6.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL

1. Data Umum Provinsi Sumatera Barat

A. Wilayah Kerja

Luas Wilayah Sumatera Barat : 42.252,24 km², yang merupakan *catchment area* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh, dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Dharmasraya.



Gambar 1.3. Peta Wilayah Sumatera Barat

Sebelah barat pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara. Daerah Sumatera Barat dilewati garis Khatulistiwa sehingga Provinsi Sumatera Barat tergolong beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi, ketinggian permukaan Sumatera Barat bervariasi, sebagian daerahnya pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman dan Kota Padang.

B. Pola Transportasi

Pada umumnya transportasi yang digunakan untuk menjangkau seluruh wilayah kerja adalah melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan umum yang cukup tersedia, sedangkan untuk Kepulauan Mentawai menggunakan transportasi laut berupa kapal penumpang umum dengan jadwal keberangkatan minimal 2 kali dalam seminggu atau dengan pesawat udara.

2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kab / Kota

Pengawasan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Loka POM di Payakumbuh serta Loka POM di Dharmasraya meliputi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan pada 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota.

Tabel 1.4. Tabel Jumlah Sarana Distribusi dan Sarana Produksi Obat dan Makanan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA	
Sarana Distribusi			
1.	PBF	41	Sarana
2.	Apotek	597	Sarana
3.	Toko Obat	323	Sarana
4.	Klinik	142	Sarana
5.	Rumah Sakit	76	Sarana
6.	Puskesmas	278	Sarana
7.	GFK	20	Sarana
8.	BKKBN	18	Sarana
9.	Distribusi Makanan	1002	Sarana
10.	Distribusi Kosmetik dan Salon	860	Sarana
11.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	440	Sarana
12.	Distribusi Bahan Berbahaya	135	Sarana

TOTAL SARANA DISTRIBUSI		3932	Sarana
Sarana Produksi			
1.	Industri Farmasi	1	Sarana
2.	Industri Obat Tradisional	1	Sarana
3.	UMOT	3	Sarana
4.	UKOT	1	Sarana
5	Industri Kosmetik	7	Sarana
6.	Industri Makanan (MD)	51	Sarana
7.	PIRT	5207	Sarana
TOTAL SARANA PRODUKSI		5271	Sarana

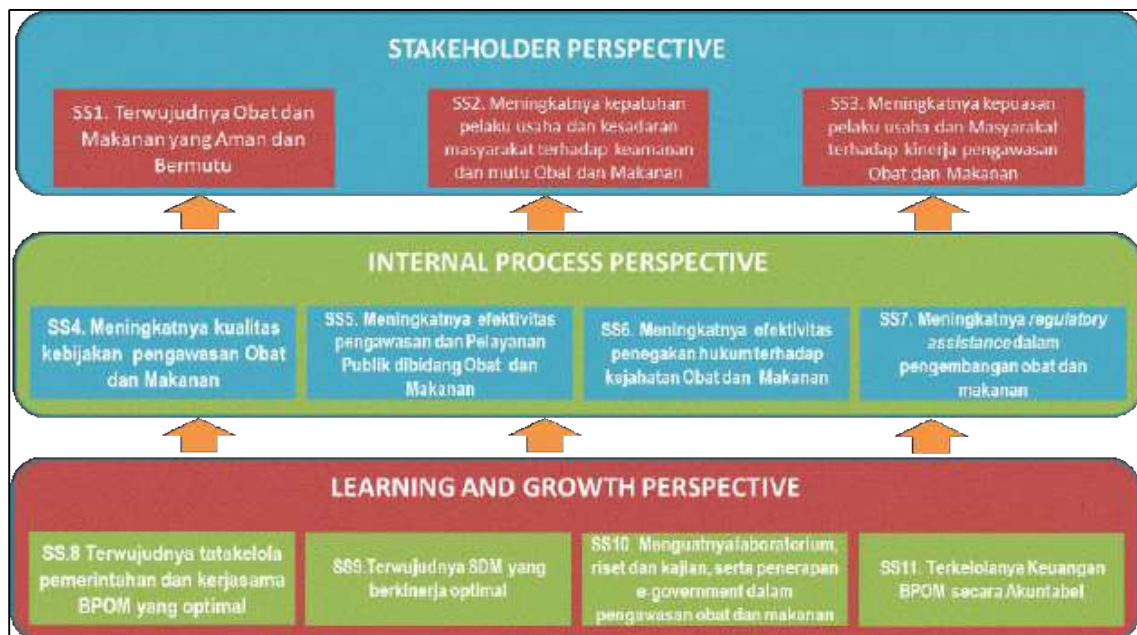
BAB II PERENCANAAN KINERJA



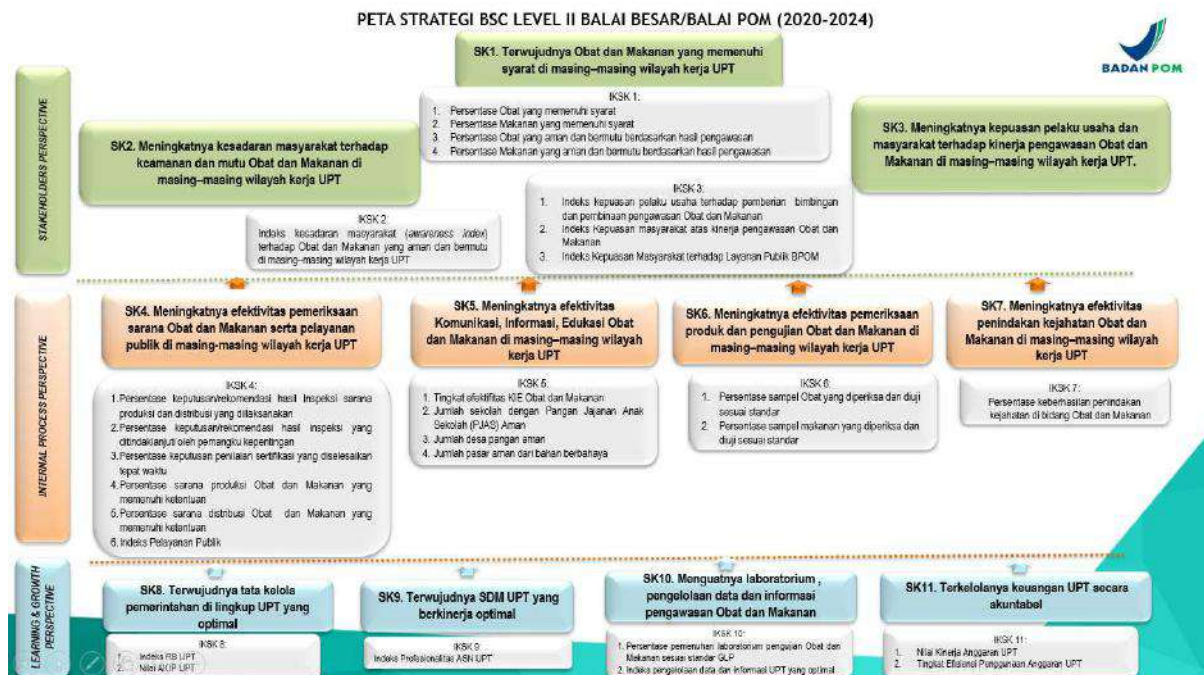
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategi yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020 -2024.

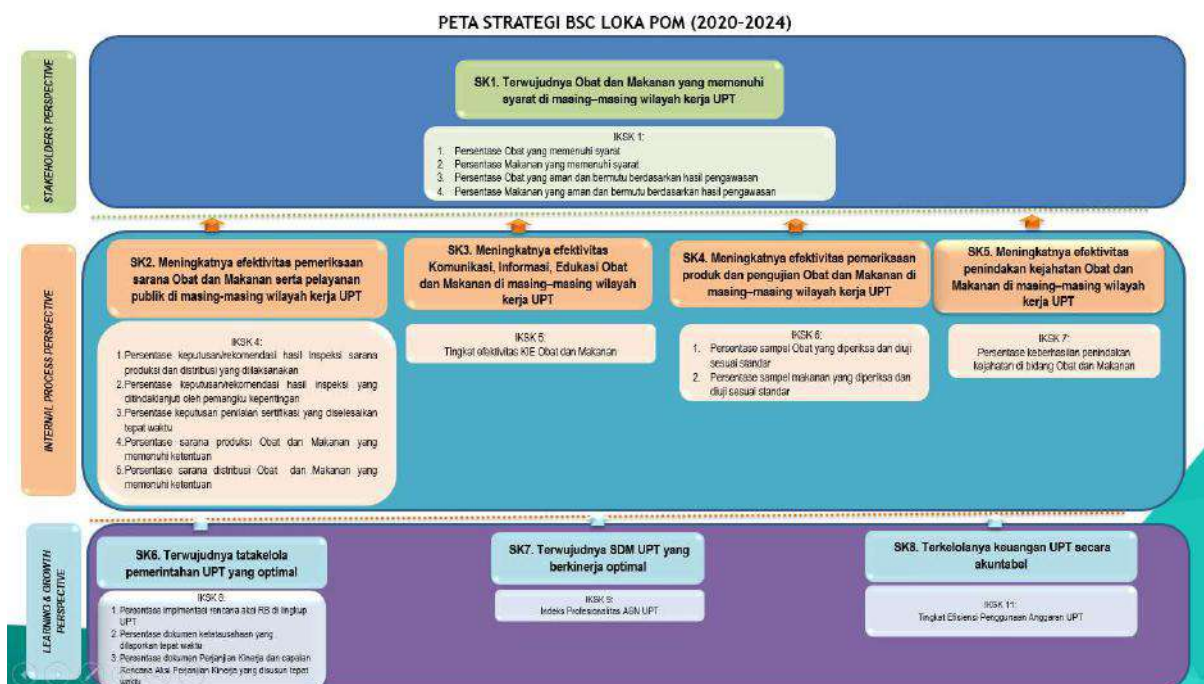
Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Sumatera Barat. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1. Peta Strategi Level 0 Kepala BPOM RI



Gambar 2.2. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang



Gambar 2.3. Peta Strategi Level 2 Loka POM

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2020-2024** yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- 7) Penguatan pengujian, riset, kajian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Rincian Sasaran Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Peta Strategi Balai Besar POM di Padang sebagai berikut :

A. Stakeholder Perspective:

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Padang tergolong produk berisiko tinggi sehingga tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan.

Pengawasan post-market dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Ke-empat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika

pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92,3% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 86% pada akhir tahun 2024.
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pengawasan dengan target 92% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 77% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan target sebesar 83 pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi

ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Padang berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai Besar POM di Padang bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan dengan target sebesar 90 pada akhir tahun 2024.
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 84 pada akhir tahun 2024.
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM dengan target sebesar 92 pada akhir tahun 2024.

B. Internal Process Perspective

Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Padang mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Padang, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Padang mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Padang perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 91% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 85 % pada akhir tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 91% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 58% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 68% pada akhir tahun 2024.
6. Indeks Pelayanan Publik dengan target sebesar 4,51 pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi.

Dengan peningkatan efektifitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah :

1. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan dengan target sebesar 96,19 % pada akhir tahun 2024.
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target sebanyak 102 sekolah pada akhir tahun 2024.
3. Jumlah desa pangan aman dengan target sebanyak 46 desa pada akhir tahun 2024.
4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya sebanyak 15 pasar pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-6 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional. Jenis produk berkembang sangat pesat, sehingga tidak semua metode analisis yang dibutuhkan telah tersedia pada buku standar tersebut atau tidak semua metode analisis pada buku standar dapat digunakan dalam pengujian produk.

Dalam mengawal mutu dan keamanan produk perlu dikembangkan metode analisis yang disesuaikan dengan profil dan matriks sampel. Dalam validasi metode analisis dan pengujian diperlukan baku pembanding sebagai penentu validitas metode dan hasil pengujian, sedangkan di pasaran tidak selalu tersedia baku pembanding yang dibutuhkan. Semua sampel yang berasal dari sampel prioritas sampling dan sampel dari pihak ke-3 juga dituntut untuk diselesaikan tepat waktu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 94% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 90% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-7 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Padang menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Padang melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang profesional, akuntabilitas, efektif dan efisien sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU)nya :

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dengan target sebesar 95% pada akhir tahun 2024.

C. Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis Ke-8: Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai Besar POM di Padang berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area

perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Padang akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Besar POM di Padang. Pada tahun 2020-2024, Balai Besar POM di Padang berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Balai Besar POM di Padang agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Padang untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Padang diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Indeks RB di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan target sebesar 95 pada akhir tahun 2024.
2. Nilai AKIP di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan target sebesar 92 pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-9: Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Padang dengan target sebesar 85 di akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pemenuhan standar GLP adalah sebagai upaya Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Padang untuk memenuhi Standar Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium dan standar kompetensi personal laboratorium, alat laboratorium yang digunakan harus terkalibrasi dan dipelihara dengan baik,

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai Besar POM di Padang di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai Besar POM di Padang

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP sebesar 85% pada akhir tahun 2024.
2. Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal dengan target sebesar 3 pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Padang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

1. Nilai kinerja anggaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan target sebesar 97% pada akhir tahun anggaran 2024.
2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan target efisien sebesar 96% pada akhir tahun 2024.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Visi	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi	1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing

	untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
Tujuan	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
Sasaran Strategis	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Sasaran Strategis	8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal
	9. Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal
	10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
	11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Balai Besar POM di Padang untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan melalui pelaksanaan operasional kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran strategis, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Padang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Padang No. PR.04.01.93.931.12.20.189 Tahun 2020 tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Padang. RKT disusun dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi Balai Besar POM di Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan, antara lain:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;

- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerimaamanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerjapegawai.

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2021 ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI PADANG

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
		Indeks Pelayanan Publik	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,54
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	87
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	85
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Untuk memantau pencapaian Perjanjian Kinerja secara berkala maka telah ditetapkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Padang. RAPK memuat target kinerja per triwulan dan anggaran per indikator kinerja.

Tabel.2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM Di Padang

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	Rp 179.172.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	Rp 35.865.000
		Persentase Obat yang	87	87	87	87	Rp 421.199.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(RUPIAH)
	Makanan di Padang	aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan					
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68	68	68	68	Rp 197.217.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				73	Rp 503.630.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				87	Rp 101.461.500
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				75	Rp 1.950.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				90,5	Rp 450.000.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	Rp 107.876.000
		Persentase keputusan/rekomendas	70	70	70	70	Rp 992.236.500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(RUPIAH)
		i hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan					
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	Rp 101.461.500
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49	49	49	49	Rp 107.876.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	62	62	62	Rp 992.236.500
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				3,76	Rp.222.000.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,64	90,64	90,64	90,64	Rp 1.950.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	40%	70%	40	Rp 688.161.000
		Jumlah desa pangan aman	10%	40%	75%	18	Rp 528.788.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10%	40%	70%	6	Rp 256.802.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	40	75	91	Rp 2.254.161.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	35	70	87	Rp 2.151.699.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di	20	30	50	89	Rp. 1.010.575.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(RUPIAH)
	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	bidang Obat dan Makanan					
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				92	Rp. 265.220.000
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				85	Rp. 1.538.216.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				77	Rp. 277.880.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				82	Rp. 4.029.750.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2	2	2	2	Rp. 1.195.000.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	45	50	60	94	Rp. 17.874.800.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Efisien (93 %)	Efisien (93 %)	Efisien (93 %)	Efisien (93 %)	. 5.537.172.000

2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Penetapan kriteria pencapaian indikator bertujuan untuk:

- 1) Sebagai *review* dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.

- 2) Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja.

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator kinerja utama (IKU) dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

PERHITUNGAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) sebagai berikut :

- a. NPS per Sasaran = $\{ \% \text{capaian indikator}_1 + \% \text{capaian indikator}_2 + \dots \% \text{capaian indikator}_n \} / n$
 1. Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran maka NPS ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator.
 2. Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator.
 3. Indikator dengan capaian >120%, penghitungan NPS menggunakan nilai maks 120%
- b. NPS per Perspektif = $\{ \% \text{capaian sasaran}_1 + \% \text{capaian sasaran}_2 + \dots \% \text{capaian sasaran}_n \} / n$
Perspektif yang memiliki lebih dari 1 (satu) sasaran NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh sasaran dalam 1 (satu) perspektif.
- c. NPS Total = $\{ \text{NPS Perspektif}_1 + \text{NPS Perspektif}_2 + \text{NPS Perspektif}_3 \} / 3$

NPS total ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh perspektif. Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021 No PR.04.01.93.931.12.20.189 tanggal 14 Desember 2020, Penetapan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2021 memuat 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian sebelas sasaran kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada Triwulan I tahun 2021 yang merupakan tahun kedua dari periode Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	NILAI CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	105,87	105,43	Baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Capaian dihitung pada akhir tahun	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Capaian dihitung pada akhir tahun	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	102,82	101,19	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	145,00	120	Tidak dapat disimpulkan
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	105,72	104,02	Baik
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	119,80	119,80	Sangat Baik
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Capaian dihitung pada akhir tahun	-	-
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Capaian dihitung pada akhir tahun	-	-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Capaian di hitung pada akhir tahun	-	-
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	86,02	86,02	Cukup

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2021

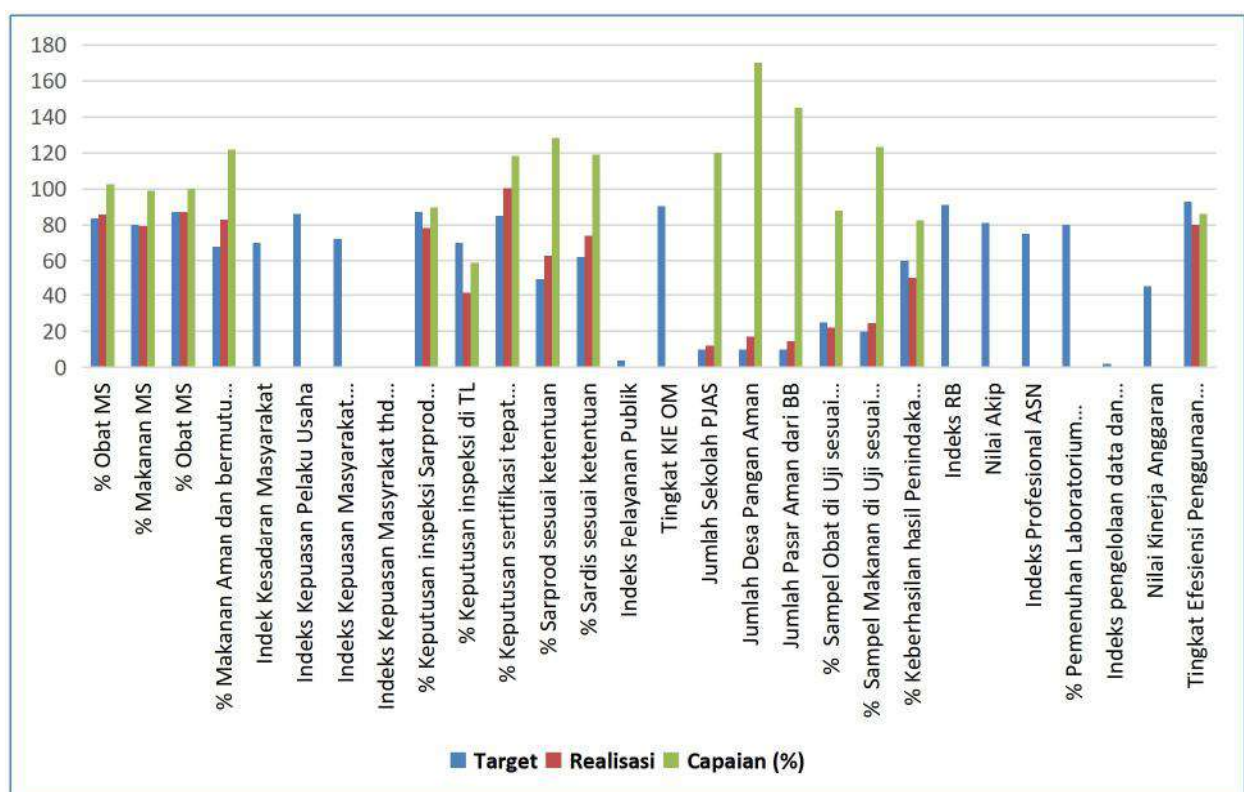
Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 28 indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel 3.2. di bawah ini:

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	85,61	102,64
		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	79,13	98,91
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87,14	100,16
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68	82,81	121,78
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	73	Dihitung pada akhir tahun	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87	Dihitung pada akhir tahun	-
		7.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75	Dihitung pada akhir tahun	-
		8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5	Dihitung pada akhir tahun	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	9.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	78,11	89,78
		10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	41,23	58,90
		11.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100,53	118,27
		12.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49	62,79	128,14

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)
		13.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	73,79	119,01
		14.	Indeks Pelayanan Publik	3,76	Dihitung pada tw 3	-
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,54	Belum ada nilai tw 3	-
		16.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	12%	120
		17.	Jumlah desa pangan aman	10%	17%	170
		18.	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10%	14,5%	145
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	22,01	88,04
		20.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	24,68	123,40
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	21.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	23,96	119,79
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	22.	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92	Dihitung pada akhir tahun	-
		23.	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	85	Dihitung pada akhir tahun	-
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	24.	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	77	Dihitung pada akhir tahun	-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	25.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	Dihitung pada akhir tahun	-
		26.	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2	Belum ada nilai tw 1	-

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	27.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	45	Belum ada nilai EKA	-
		28.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93	80	86,02

Tabel 3.2. Perbandingan target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama Triwulan I Tahun 2021



Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan III Tahun 2021

Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama (IKU) terdapat 4 indikator yang mencapai target dengan kriteria sangat baik, 3 indikator dengan kriteria baik, 5 indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, 3 indikator dengan kriteria cukup dan 1 indikator dengan kriteria kurang. Sebanyak 12 indikator belum dihitung sehingga belum diketahui kriteria capaian untuk indikator tersebut. Analisa tentang capaian ini akan dibahas secara rinci dalam uraian pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja berikut.

3.1.1 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 105,87% dengan kriteria baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	85,81	102,64	Baik
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00	79,13	98,91	Baik
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,00	87,14	100,16	Baik
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68,00	82,81	121,78	Tidak Dapat disimpulkan

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I.

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-I sebagai berikut :

A. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak obat MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}}$$

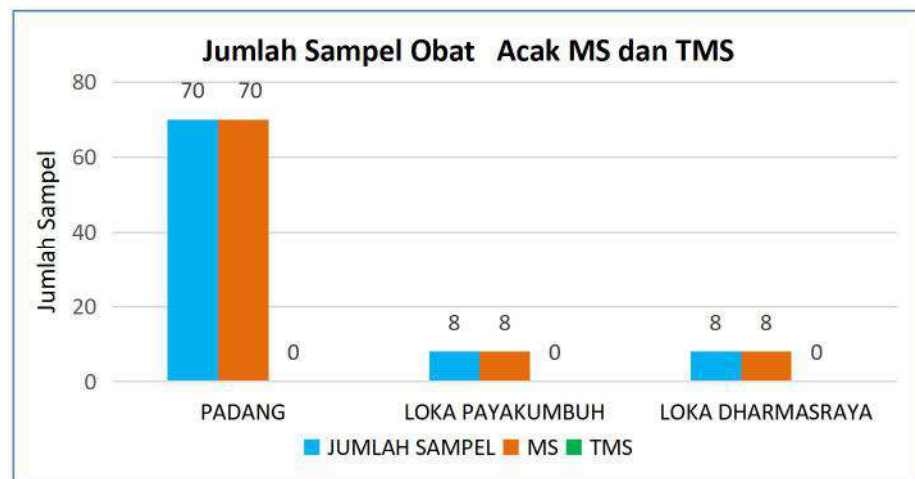
- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel obat acak yang memenuhi syarat terhadap total sampel obat acak yang diperiksa dan diuji.
- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- Sampel acak adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk (Obat / Makanan) beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	83,60	85,81	102,64	Baik

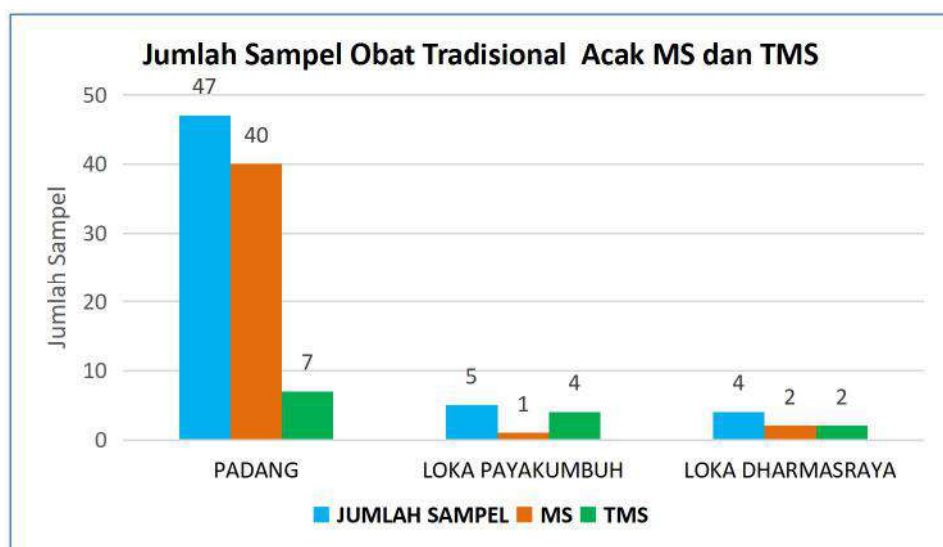
Tabel 3.4 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan I tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

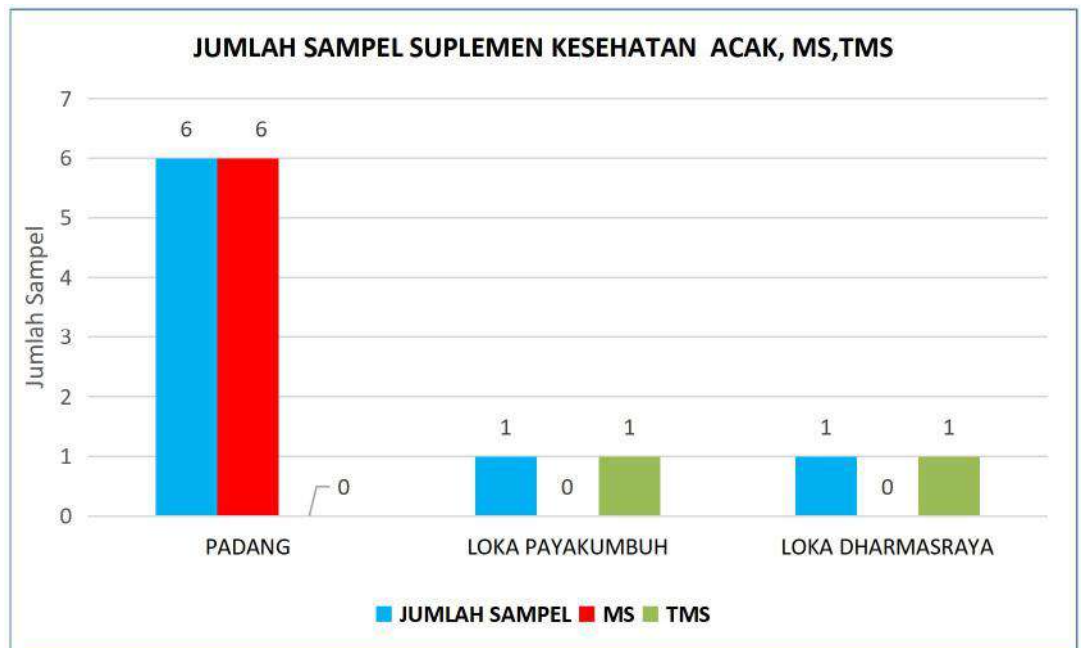
Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I tahun 2021 adalah 85,81% bila dibandingkan dengan target 83,60%, maka capaian yang diperoleh adalah 102,64% dan mendapatkan kriteria baik dengan rincian 43 sampel tidak memenuhi syarat (14,19%) dari 303 sampel yang selesai diuji pada Triwulan I 2021



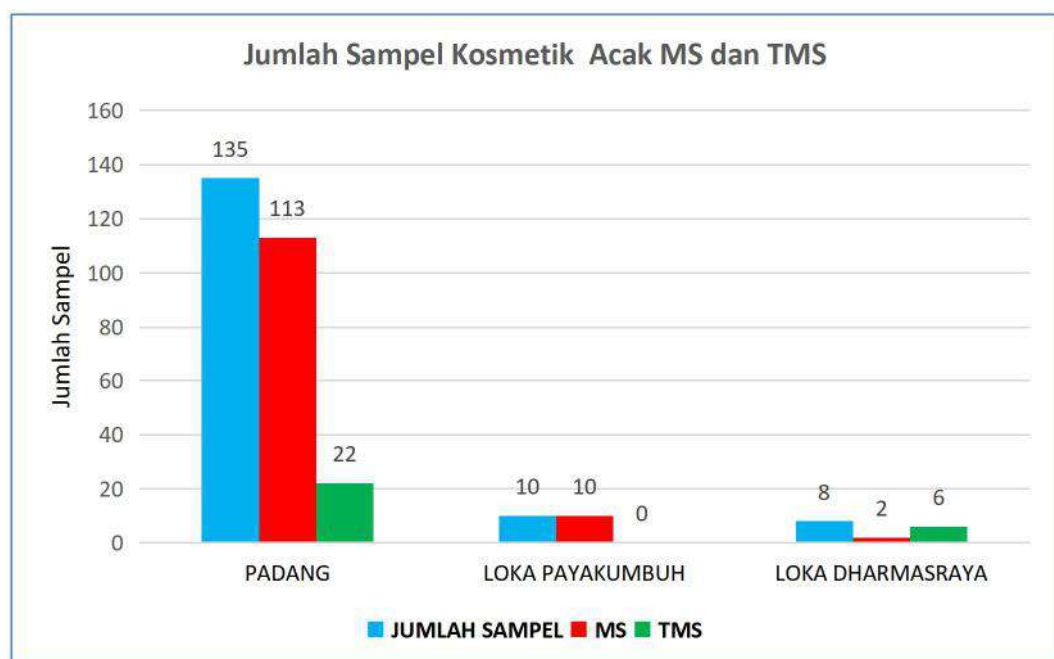
Gambar 3.2 Jumlah Sampel Obat Acak MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021



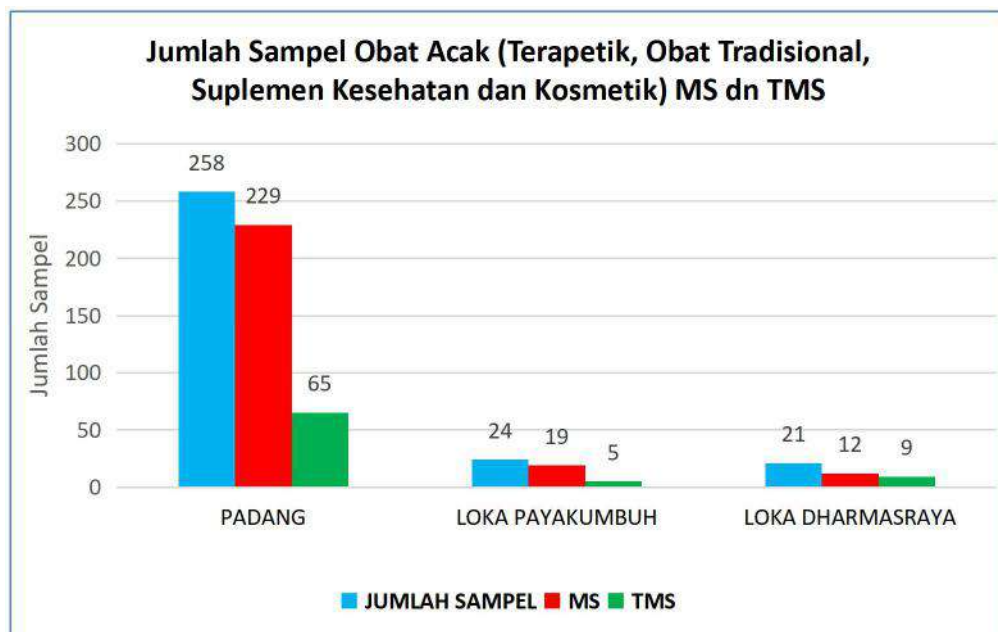
Gambar 3.3 Jumlah Sampel Obat Tradisional Acak MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021



Gambar 3.4 Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan Acak MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021



Gambar 3.5 Jumlah Sampel Kosmetik Acak MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021



Gambar 3.6 Jumlah Sampel Obat Acak (Terapetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I tahun 2021 adalah 85,81% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 83,6%, maka capaian yang diperoleh sama yaitu sebesar 102,64%.

B. Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}}$$

- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel Makanan acak yang memenuhi syarat terhadap total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji.
- Sampel acak adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Makanan beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

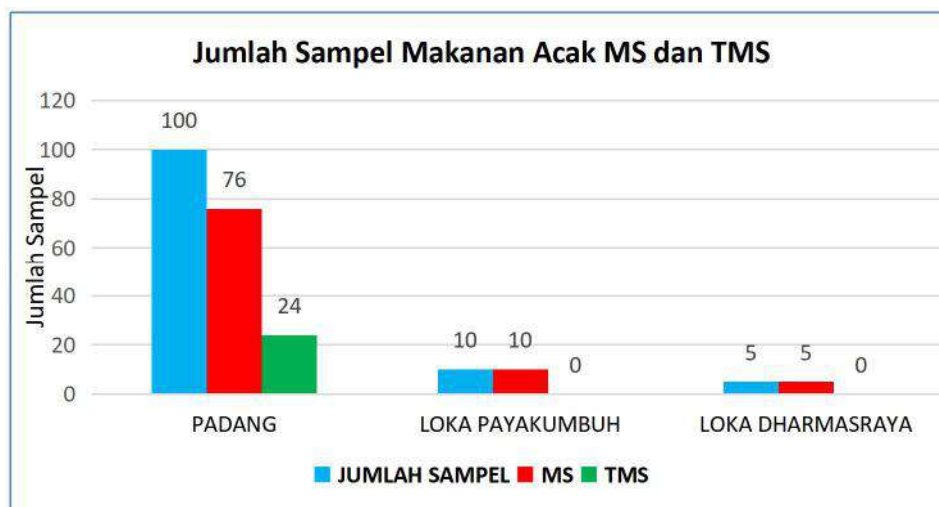
- Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	80	79,13	98,91%	Baik

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi makanan yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan I tahun 2021 adalah 79,13%. Sedangkan target persentase makanan yang memenuhi syarat adalah 80%, maka capaian Balai Besar POM di Padang adalah 98,91% dengan kriteria baik. Rincian jumlah yang memenuhi syarat adalah 91 sampel dan tidak memenuhi syarat sebanyak 24 sampel dari 115 sampel yang selesai uji pada Triwulan I tahun 2021



Gambar 3.7 Sampel Makanan Acak MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I tahun 2021 adalah 79,13% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 80%, maka capaian sama yaitu sebesar 98,91%.

C. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sbb:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted obat MS}}{\text{Total sampel targeted obat yang diperiksa dan diuji}}$$

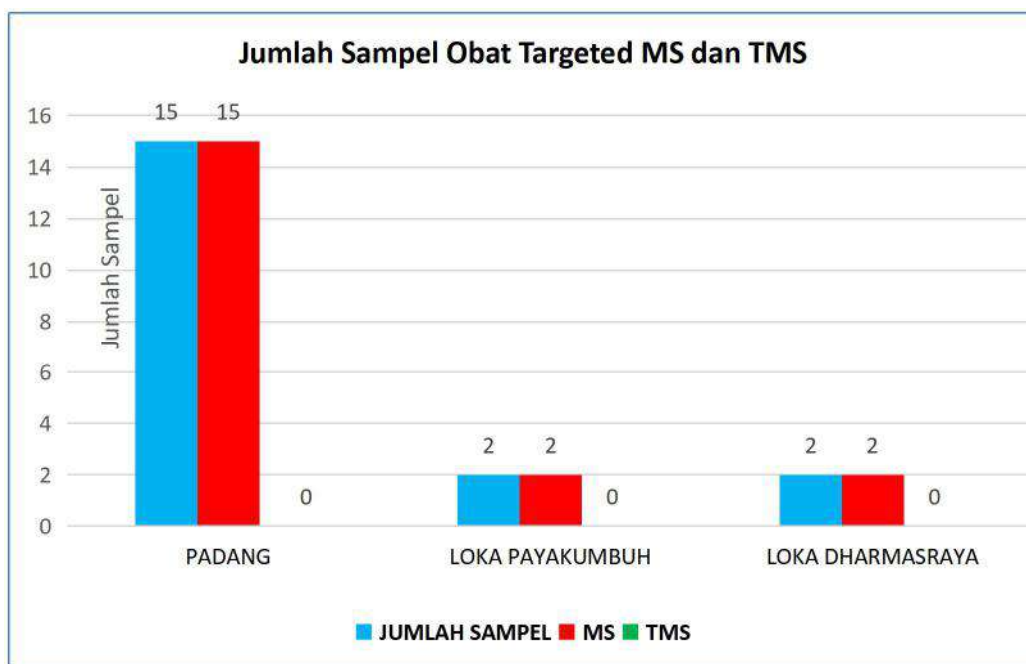
- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel obat targeted yang memenuhi syarat terhadap total sampel obat targeted yang diperiksa dan diuji.
- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- Sampel targeted adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Obat beredar berdasarkan data survey produk beredar berdasarkan kerangka sampling targeted/purpose di tahun berjalan
- Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87,14	100,16	Baik

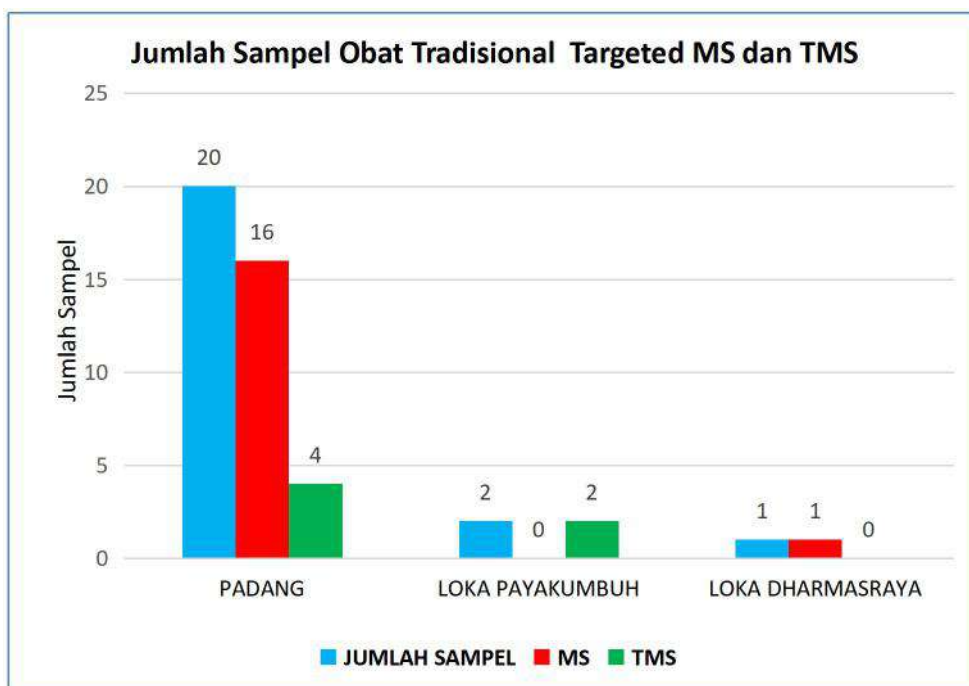
Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

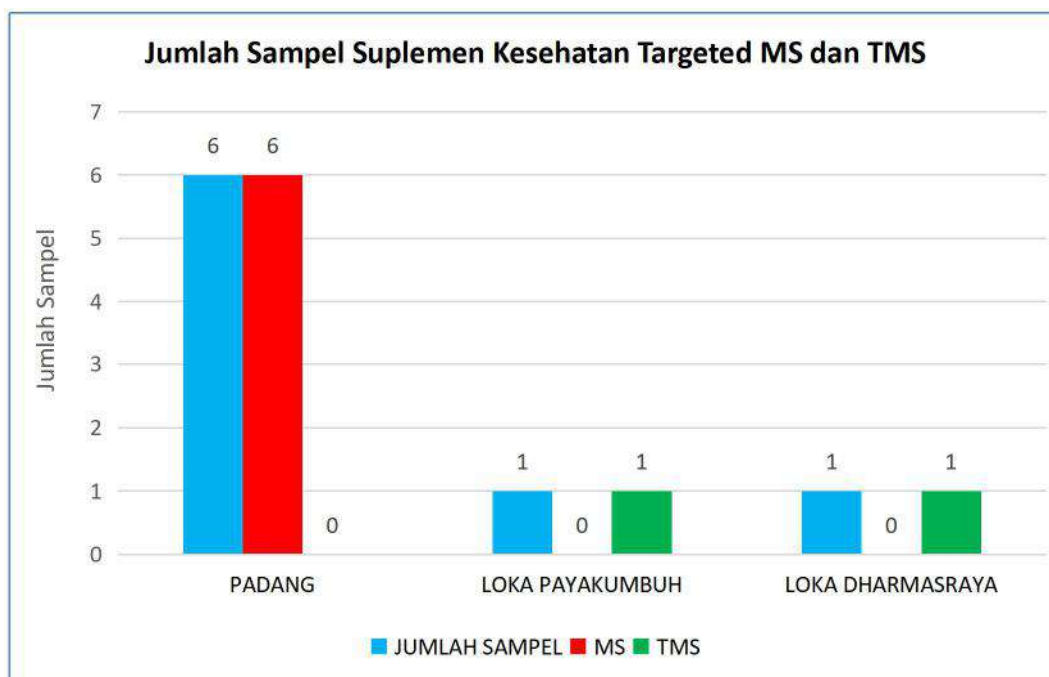
Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan I tahun 2021 adalah 87,14 % , bila dibandingkan dengan target 87%, maka capaian tahun 2021 adalah 100,16% dengan kriteria baik. Rncian dari 70 sampel yang diuji pada Triwulan I tahun 2021 adalah sebanyak 61 sampel memenuhi syarat dan 9 sampel tidak memenuhi syarat.



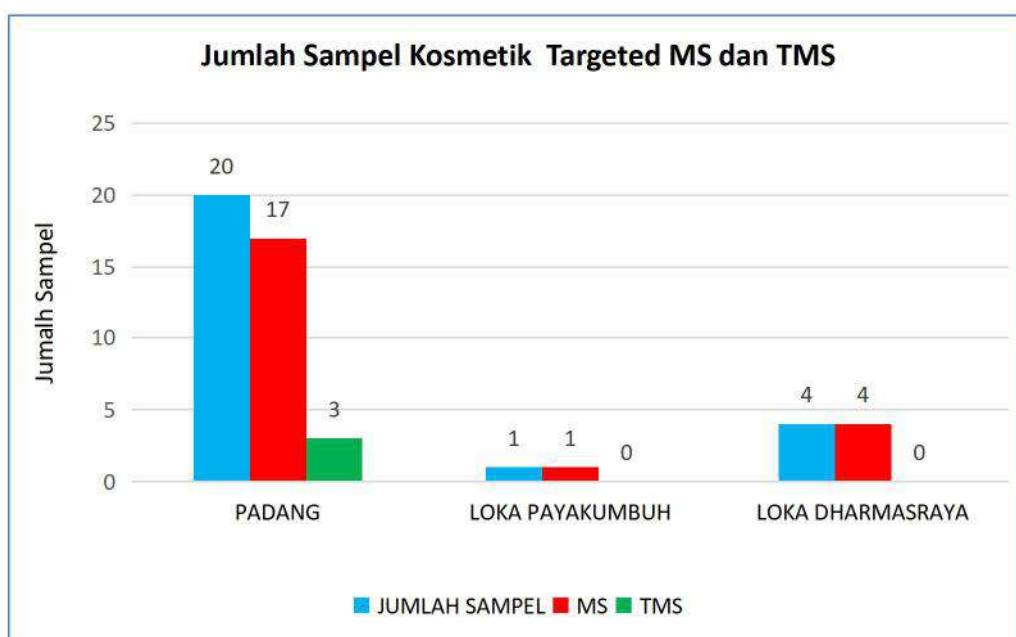
Gambar 3.8 Jumlah Sampel Obat Targeted MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021



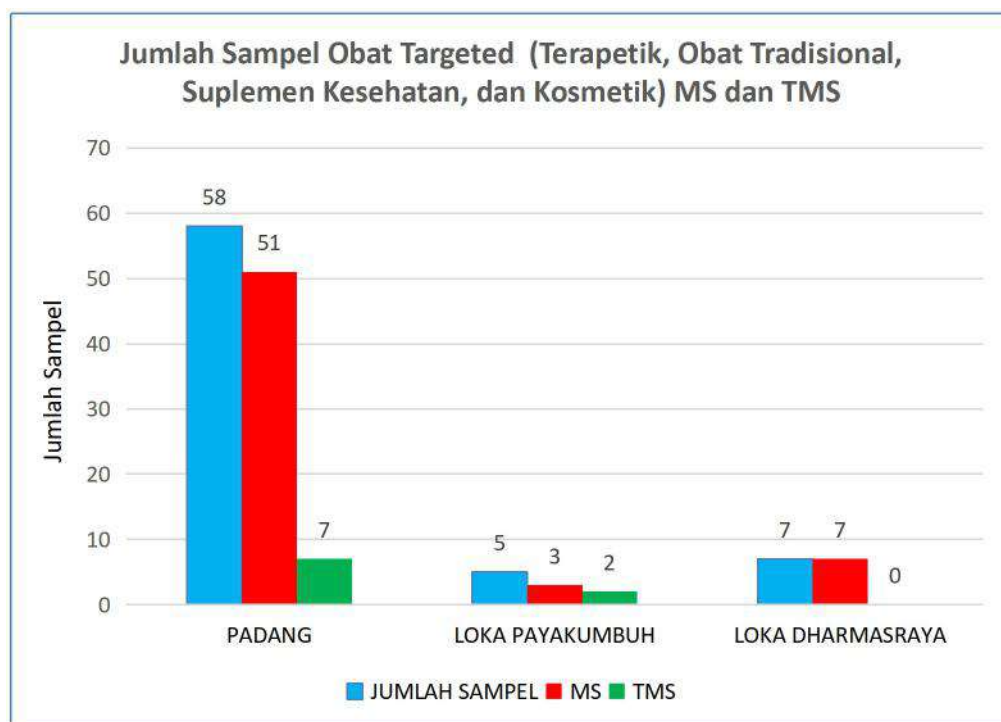
Gambar 3.9 Jumlah Sampel Obat Tradisional Targeted MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021



Gambar 3.10 Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan Targeted MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021



Gambar 3.11 Jumlah Sampel Kosmetik Targeted MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021



Gambar 3.12 Jumlah Sampel Obat Targeted (Terapetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TriwulanI Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I tahun 2021 adalah 87,14% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 87%, maka capaian sama yaitu sebesar 100,16%

D. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan menggunakan rumus sbb :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted makanan MS}}{\text{Total sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji}}$$

- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel makanan targeted yang memenuhi syarat terhadap total sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji.

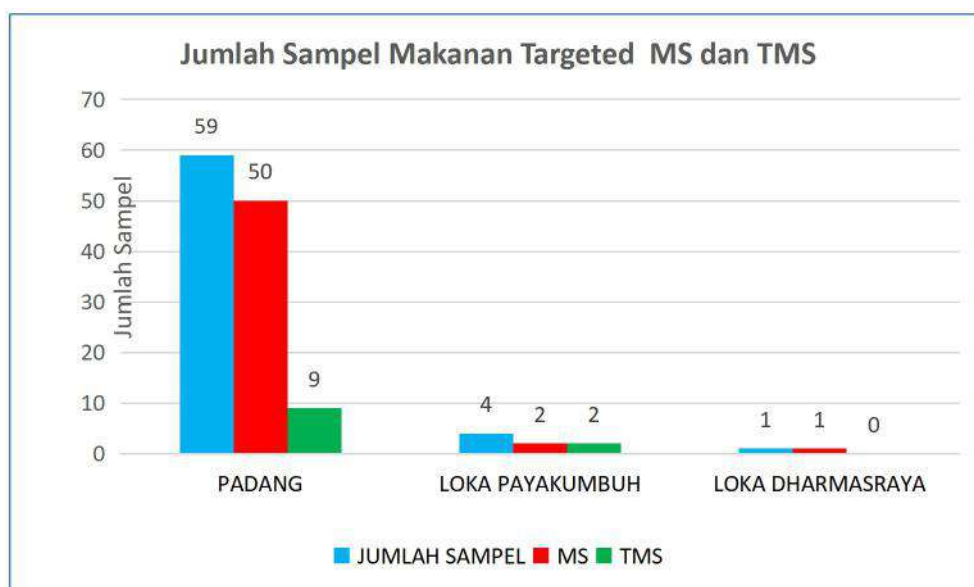
- Sampel targeted adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Makanan beredar berdasarkan data survey produk beredar berdasarkan kerangka sampling targeted/purpose di tahun berjalan.
- Kriteria Makanan tidak memenuhi syarat adalah jika pangan atau kemasan pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68	82,81	121,78%	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2021 adalah 82,81%. Apabila dibandingkan dengan target 68% maka persentase capaian Triwulan I tahun 2021 adalah sebesar 121,78% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Rincian hasil uji 11 sampel tidak memenuhi syarat dan 53 sampel memenuhi syarat dari total 64 sampel yang selesai duji pada Triwulan I tahun 2021.



ambar 3.13 Jumlah Sampel Makanan Targeted MS dan TMS Triwulan I Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I tahun 2021 adalah 82,81% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 68%, maka capaian sama yaitu sebesar 121,78%

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN, ANALISIS PROGRAM, DAN EVALUASI DANA ANALISIS TERKAIT TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN TERHADAP CAPAIAN SASARAN I

I. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Tingginya angka capaian terhadap target yang telah ditetapkan untuk produk obat ini menunjukkan semakin banyaknya produk obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang beredar khususnya di wilayah Sumatera Barat, dengan kualitas/mutu yang memenuhi persyaratan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha untuk menerapkan Cara Produksi dan/atau Cara Distribusi yang Baik
2. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM secara Nasional, serta Balai Besar POM di Padang, Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dharmasraya sebagai unit kerja di wilayah Sumatera Barat terhadap pelaku usaha semakin efektif
3. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan terhadap produk yang beredar dan sarana produksi dan distribusi, yang dilakukan oleh Badan POM secara Nasional, serta Balai Besar POM di Padang, Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dharmasraya, telah direspon dengan baik oleh pelaku usaha
4. Semakin meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam memilih produk yang baik atau memenuhi persyaratan untuk dikonsumsi. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya permintaan pasar akan produk – produk yang aman dan bermutu. Sehingga secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk senantiasa menjaga mutu produk yang akan mereka edarkan
5. Semakin meningkatnya kapasitas/ kemampuan dari Balai Besar POM di Padang, Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dharmasraya dalam melakukan pengawasan terhadap mutu produk yang beredar.

Peningkatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

Balai Besar POM di Padang :

- a. Kegiatan sampling obat dan makanan serta pengujian telah dilakukan sesuai pedoman sampling tahun 2021
- b. Peningkatan kompetensi penguji sudah dilakukan dengan baik
- c. Koordinasi antara Bidang Pemeriksaan, Bidang Pengujian dan Bagian Tata Usaha
- d. Penyediaan baku pembanding, reagensia dan alat laboratorium
- e. Koordinasi dengan pusat apabila terkendala dengan metoda analisa dan baku pembanding.
- f. Peningkatan pemeliharaan alat laboratorium

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Sampling Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman sampling tahun 2021 yaitu dilakukan secara acak /random dan targeted.
- b. Penilaian terhadap penandaan /label sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah dilakukan sesuai dengan juknis penilaian label untuk masing-masing komoditi.
- c. Penanganan sampel dilakukan dengan baik terutama untuk sampel yang memerlukan penyimpanan khusus seperti penyimpanan dingin / beku agar tidak mempengaruhi terhadap hasil pengujian terutama mikrobiologi.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan dilakukan sesuai dengan prioritas pedoman sampling tahun 2021.
- b. Koordinasi dengan fungsi pengujian Balai Besar POM di Padang

II. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja terhadap indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat ini ditunjang oleh berbagai kegiatan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang, LOKA POM Payakumbuh dan LOKA POM Dharmasraya sebagai berikut :

1. Kegiatan pendampingan terhadap pelaku usaha yang berkeinginan mendaftarkan produk untuk diedarkan. Pendampingan yang dilakukan dapat berupa

pendampingan terhadap pembuatan denah sarana produksi, penyusunan alur produksi, cara produksi yang baik serta desain kemasan yang sesuai. Pendampingan ini bertujuan agar pelaku usaha mampu memproduksi produk-produk yang Memenuhi Persyaratan untuk diedarkan dan dikonsumsi masyarakat

2. Kegiatan pengawasan pada tahap *premarket*. Pengawasan dilakukan terhadap sarana produksi dan produk yang akan diedarkan. Terhadap sarana dilakukan melalui kegiatan sertifikasi. Terhadap produk dilakukan melalui kegiatan pengujian mutu produk. Pengawasan premarket ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan mutu produk yang akan diedarkan serta untuk memastikan komitmen pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip cara produksi yang baik.
3. Kegiatan pengawasan pada tahap *postmarket*. Pengawasan postmarket dilakukan terhadap sarana, produk yang dihasilkan serta pengawasan iklan dan penandaan produk yang beredar di masyarakat. Pengawasan sarana dilakukan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi. Pengawasan terhadap produk dilakukan dengan cara melakukan pengujian terhadap produk-produk yang beredar dengan menggunakan metoda sampling secara random. Pengawasan iklan dilakukan dengan memantau iklan terhadap produk yang ada diberbagai media. Pengawasan penandaan dilakukan terhadap kesesuaian penandaan produk yang beredar di pasaran dengan penandaan produk yang didaftarkan oleh pelaku usaha. Pengawasan pada tahap Post Market ini bertujuan untuk melihat kepatuhan dan konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan peraturan yang berlaku serta prinsip cara produksi dan/atau cara distribusi yang baik. Disamping itu juga bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar agar layak dikonsumsi masyarakat serta kesesuaian iklan dan penandaan produk yang beredar.
4. Kegiatan KIE kepada seluruh lapisan masyarakat, kegiatan ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi. Kegiatan ini untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan Makanan.
5. Kegiatan peningkatan kompetensi, monitoring dan evaluasi, pengadaan sumberdaya pendukung, serta kegiatan yang terkait dengan mutu dan kualitas pelayanan di lingkungan Balai Besar POM di Padang, LOKA POM Payakumbuh dan LOKA POM Dharmasraya, sebagai berikut :

Kegiatan dan program yang menunjang sebagai berikut :

Balai Besar POM di Padang :

- a. Peningkatan kemampuan ruang lingkup pengujian
- b. Peningkatan kompetensi penguji sesuai ruang lingkup pedoman sampling dan pengujian
- c. Rapat evaluasi bulanan atau triwulan bersama antara bidang pemeriksaan, dan bidang pengujian
- d. Pengadaan baku pembanding secara mandiri
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji di laboratorium
- f. Melakukan pengujian, pemeliharaan alat sesuai SOP Mikro
- g. Melakukan Jaminan Mutu Hasil Pengujian Yaitu : Uji Propisiensi, Uji baku pembanding dan Uji Metoda analisa yang telah dilakukan pada laboratorium Obat dan Nafza sebanyak 3 bh, Laboratorium Kosmetik sebanyak 1 buah dan, Labotorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 1 bh
- h. Melakukan Audit QMS ISO 9001 : 2015
- i. Melakukan Audit Surveilans KAN 17025: 2017
- j. Pemantauan kemampuan pengujian Laboratorium Obat tradisional dan SK oleh P3OMN
- k. Melakukan Verifikasi Metoda analisa pada laboratorium Obat Tradisional dan SK dan laboratorium Obat
- l. Melakukan Verifikasi Alat
- m. Pelatihan Analisa Instrumen secara daring pada Laboratorium Obat Tradisional dan SK dan Laboratorium Obat dan Nafza

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai dengan SOP sampling yang telah ditetapkan serta petugas sampling diberikan pemahaman terhadap pelaksanaan sampling pada pedoman prioritas sampling yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan sampling yang telah dilakukan.
- c. Memberikan pendampingan terhadap sarana produksi terutama yang dalam proses pendaftaran produk.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Peningkatan kompetensi petugas dalam melaksanakan sampling
- b. Pelaksanaan sampling dengan menerapkan juknis dalam setiap kegiatan Pengawasanperedaran produk obat dan makanan serta mengikuti pedoman sampling obat, sehingga obat yang disampling sesuai dengan kaidah sampling yang baik.

b. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

- a. Perencanaan sampling acak dengan mengatur sebaran yang merata untuk masing masing Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterwakilan uji mutu sampel yang ada diperedaraan.
- b. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha agar bisa memproduksi makanan yang aman dan bermutu
- c. Meningkatkan koordinasi antara Bidang Pengujian dan Pemeriksaan Balai Besar POM di Padang terkait pelaksanaan sampling yang akan dilakukan sehingga tidak ada kendala terhadap pengujian yang akan dilakukan di Laboratorium.
- d. Dilakukan kesepakatan dan koordinasi antara Balai Besar POM di Padang dengan Loka POM untuk meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi, serta membahas kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan sampling.

3.1.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang

Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang ini diukur pada akhir tahun 2021 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada Triwulan I Tahun 2021.

3.1.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 3 indikator kinerja utama yaitu :

- Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Semua indikator dari sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang ini diukur pada akhir tahun 2021 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada Triwulan I Tahun 2021.

3.1.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 6 indikator kinerja utama, 1 indikator Indeks Pelayanan Publik belum bisa dinlai pada triwulan I Tahun 2021. Dari hasil capaian terhadap 5 indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 102,82 dengan kriteria baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	78,11	89,78	Cukup
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	41,23	58,90	Kurang
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100,53	118,27	Sangat baik
4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49	62,79	128,14	Tidak dapat disimpulkan

5.	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	62	73,79	119,01	Sangat baik
----	---	----	-------	--------	-------------

Tabel 3.8. Capaian Sasaran Kegiatan ke IV

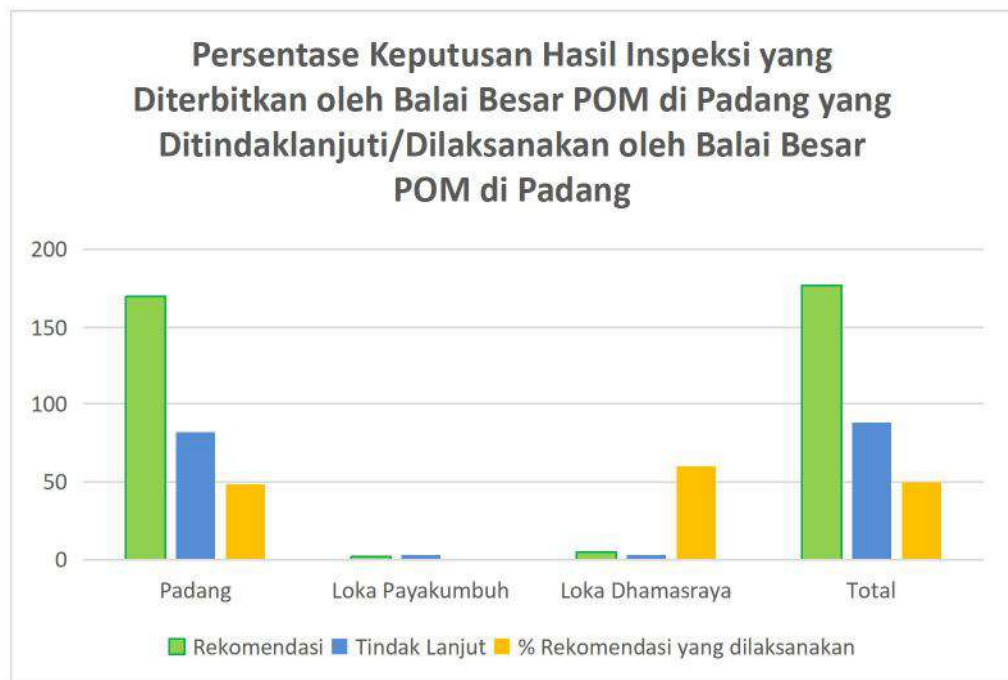
A. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari 4 komponen :

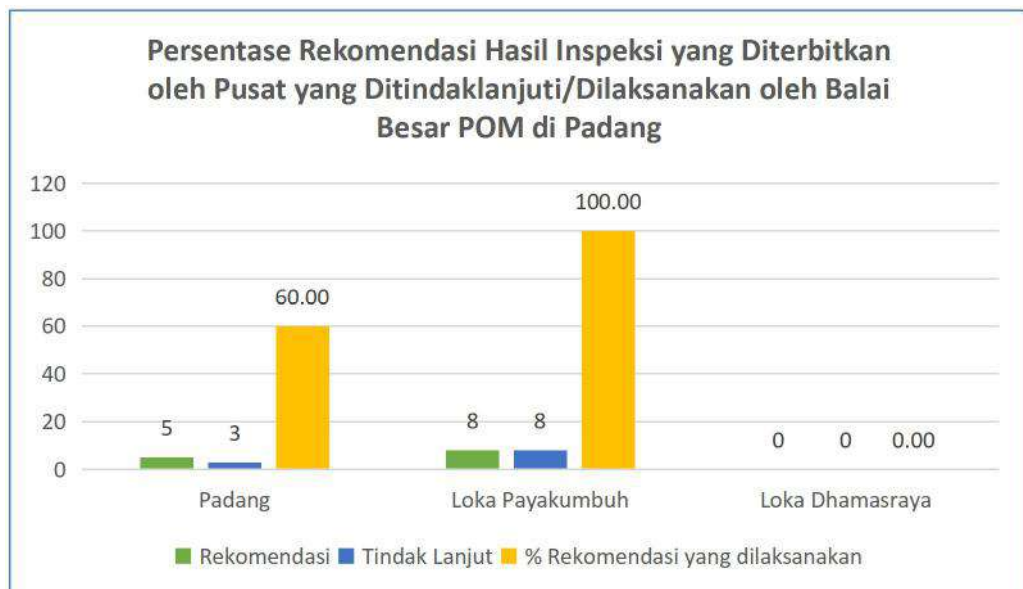
- ❖ Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang
- ❖ Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang
- ❖ Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang ditindak lanjuti/dilaksanakan oleh pusat dan UPT lain
- ❖ Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang

1. Perbandingan Target dan Realisasi TriwulanI tahun 2021

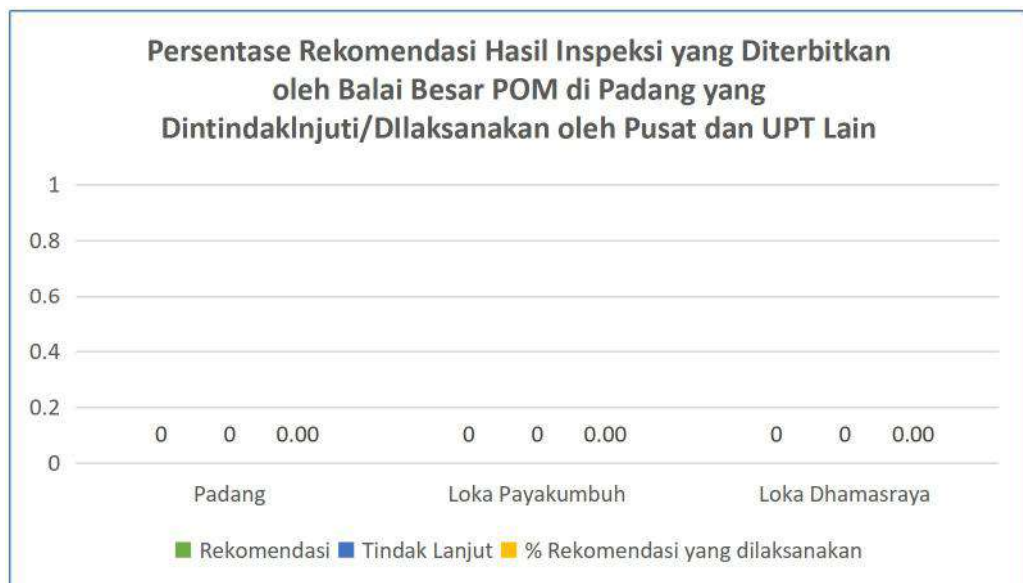
Pada TriwulanI tahun 2021 target indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 87%. Sedangkan realisasi adalah 78,11% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 89,78% dengan kriteria Baik



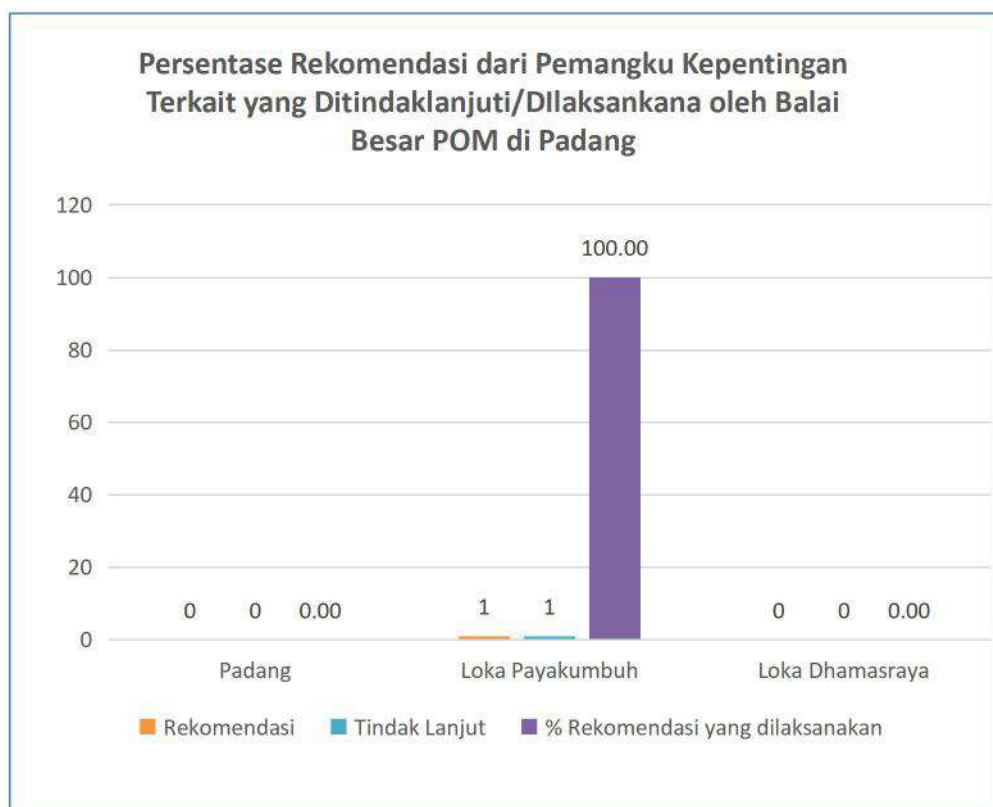
Gambar 3.14 Persentase Keputusan Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Triwulan I Tahun 2021



Gambar 3.15 Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Pusat yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Triwulan I Tahun 2021



Gambar 3.16 Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Pusat dan UPT Lain Triwulan I Tahun 2021



Gambar 3.17 Persentase Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan Terkait yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Triwulan I Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang sampai dengan Triwulan I adalah 78,11%. bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 87%, maka capaian sama yaitu sebesar 89,78%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Balai Besar POM di Padang :

- a. Petugas kesulitan dalam membagi waktu untuk membuat surat Tindak lanjut karena Padatnya kegiatan pada TW I
- b. Monitoring yang dilakukan terhadap pembuatan surat Tindak lanjut belum Optimal

Loka POM Payakumbuh:

- a. Melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi dari pusat dan lintas sektor terkait yang disampaikan ke Loka POM Payakumbuh dan meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait.
- b. Melakukan monitoring terhadap laporan pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM Payakumbuh yang disampaikan / dilaporkan ke Pusat.
- c. Melakukan monitoring terhadap rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh lintas sektor terkait.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Masih rendahnya kepedulian pelaku usaha / penanggung jawab sarana untuk memberikan umpan balik terhadap Surat Tindak Lanjut Loka POM di Kab. Dharmasraya
- b. Karena di masa pandemic covid-19, respon terhadap rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota lambat, sehingga Loka POM Dharmasraya harus meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait.
- c. Monitoring terhadap umpan balik Surat Tindak Lanjut belum efektif/ belum memadai.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang

- a. Perlunya suatu aplikasi yang dapat membantu petugas dalam pembuatan surat tindak lanjut,
- b. Perlunya aplikasi yang dapat digunakan untuk monev hasil pengawasan.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melaksanakan tindak lanjut yang diberikan baik oleh pusat maupun lintas sektor terkait sesuai dengan SOP yang ada.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan.

Loka POM di Dhamasraya :

Dilakukan pengendalian secara rutin dan monitoring terhadap surat tindak lanjut yang dibuat kepada pihak sarana maupun lintas sector daerah.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Membuat suatu aplikasi yang dapat membantu petugas dalam pembuatan surat tindak lanjut, serta aplikasi yang dapat digunakan untuk monev hasil pengawasan.

B. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan makanan.
- Pemangku kepentingan adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan yaitu pelaku usaha dan lintas sektor (Pemerintah Daerah, Kementrian/Lembaga, Organisasi Profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan obat dan makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan, hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut

adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

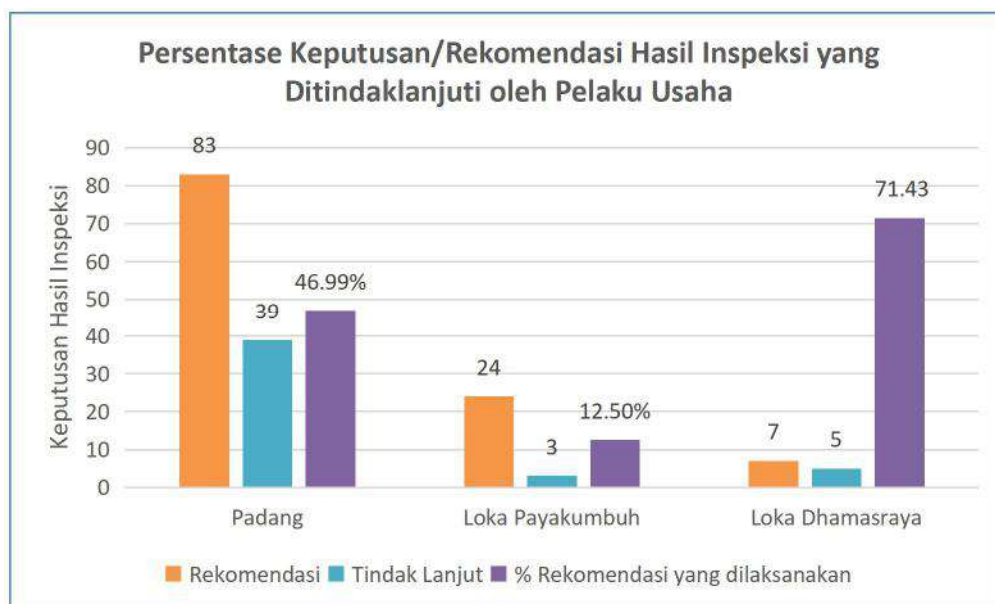
- Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stateholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	41,23	58,90	Kurang

Tabel 3.9.Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan I Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi TriwulanI Tahun 2021

Pada Triwulan I tahun 2021 target indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 70% dengan realisasi 41,23% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini pada Triwulan I Tahun 2021 adalah 58,07% dengan kriteria Kurang



Gambar 3.18 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Triwulan I Tahun 2021



Gambar 3.19 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Triwulan I Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 41,23%. bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 70%, maka capaian sama yaitu sebesar 58,90%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

- Koordinasi dengan pelaku usaha tidak dapat dilakukan dengan intens karena Padatnya kegiatan pada TW I
- Dilakukan komunikasi secara kontiniu kepada pelaku usaha/ pengelola sarana dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut, tatap muka atau melalui media email, whatsapp, SMS atau telpon.

Loka POM di Payakumbuh :

- Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang telah diberikan kepada sarana secara rutin.
- Mengingatkan sarana agar menyampaikan umpan balik terhadap tindak lanjut yang diberikan.

Loka POM di Dhamasraya :

1. Aktif mengingatkan kembali kepada pelaku usaha/pengelola melalui media email, whatsapp, SMS dan telpon tentang tindak lanjut yang sudah dikirim untuk direspon
2. Dilakukan komunikasi secara kontiniu kepada pelaku usaha/ pengelola sarana dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut, tatap muka atau melalui media email, whatsapp, SMS atau telpon.

Alternatif solusi :

Lebih aktif memantau atau mengingatkan pelaku usaha serta instansi terkait untuk memberikan umpan balik terhadap surat tindak lanjut yang dikeluarkan.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Monitoring terhadap kepastian bahwa surat tindak lanjut yang dikirimkan Balai POM ke Pemerintah Kabupaten/Kota terkait selalu dijalankan, sehingga tidak ada surat yang hilang atau tidak sampai ke tujuan.
- b. Dilakukan komunikasi secara kontiniu kepada pelaku usaha/ pengelola sarana dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut.
- c. Aktif mengingatkan kembali kepada pelaku usaha/pengelola melalui media email, whatsapp, SMS dan telpon tentang tindak lanjut yang sudah dikirim untuk direspon

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas untuk mengontrol sarana yang telah menyampaikan perbaikan terhadap rekomendasi tindak lanjut yang diberikan.
- b. Memberikan pendampingan terhadap sarana untuk perbaikan yang dilakukan sesuai tindak lanjut yang diberikan.

Loka POM di Dhamasraya :

Memonitoring tindak lanjut yang diberikan pada pelaku usaha dan melakukan koordinasi dengan lintas sektor.

5. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.**

Balai Besar POM di Padang :

Membuat suatu sistem kontrol terhadap tindak lanjut yang direspon oleh pemangku kepentingan, serta menunjuk petugas yang akan bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi dengan pelaku usaha terkait respon terhadap tindak lanjut

C. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu terhadap jumlah permohonan penilaian sertifikasi. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

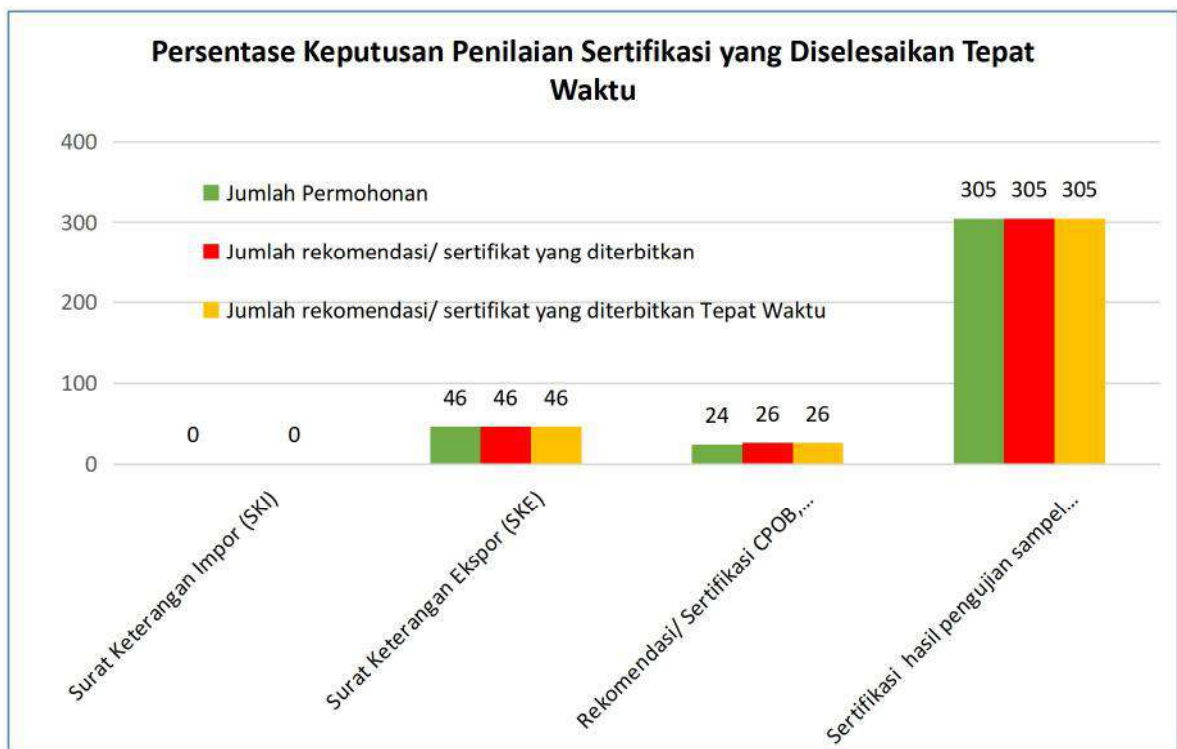
- 1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- 3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- 5) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- 6) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- 7) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- 8) Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel early warning system)

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100,53	118,27	Sangat Baik

Tabel 3.10.Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Pada Triwulan I tahun 2021 target indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 85% dengan realisasi 100,53% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 118,27% dengan kriteria Sangat Baik



Gambar 3.20 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 100,53%. bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 85%, maka capaian sama yaitu sebesar 118,27%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Balai Besar POM di Padang :

- Sarana produksi telah menyelesaikan perbaikan temuan (CAPA) yang dipersyaratkan pada triwulan IV tahun 2020 yaitu Perusda Mentawai, UD. Tek Ros, PT. Nagari Minang Jelita sehingga pada triwulan I rekomendasi dapat diterbitkan dalam rangka sertifikasi.

- Petugas telah dapat memastikan kesiapan sarana produksi secara keseluruhan sebelum dilakukannya proses audit sarana dalam rangka sertifikasi. Sehingga meminimalisir temuan audit yang menjadi kendala dalam percepatan proses penerbitan rekomendasi.
- Komunikasi yang baik terlaksana antara petugas balai dengan konsumen yang mengurus rekomendasi SKE sehingga percepatan penerbitan SKE dapat dipenuhi.
- Meningkatnya komitmen tim pengujian dan administrasi dalam penyelesaian sampel kepolisian.
- Bidang Pengujian dalam melakukan layanan pengujian pihak ke 3 telah melakukan pengujian sesuai dengan SK Kepala Balai Besar POM di Padang tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik
- Komitmen Bidang Pengujian yang memprioritaskan layanan pengujian pihak ke 3

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Pelaku usaha membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perbaikan terhadap temuan hasil audit dalam rangka pemenuhan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) agar sarana tersebut dapat diberikan rekomendasi dalam rangka sertifikasi / pendaftaran produk.
- b. Petugas aktif melakukan komunikasi dengan pelaku usaha terkait perbaikan sarana / temuan yang harus diperbaiki agar penerbitan rekomendasi dapat segera dilakukan.

Loka POM di Dhamasraya :

Belum dilakukan audit sertifikasi pada TW I 2021 karena belum adanya sarana yang bisa untuk diaudit / belum adanya sarana yang memenuhi untuk pengajuan permohonan audit sertifikasi

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

Dengan telah tercapainya persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 96,0 % (target 83 %), maka tim sertifikasi akan tetap meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait pemenuhan GMP sarana produksi. Kegiatan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan program kegiatan diantaranya :

- a. Koordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM di wilayah Sumatera Barat.
- b. Peningkatan kompetensi teknis petugas balai.
- c. Melakukan Forum Konsultasi Publik secara berkala kepada pelanggan layanan pengujian pihak ke 3 agar dalam menentukan kebijakan Layanan Pengujian Pihak ke 3 dapat dilibatkan dan dikomunikasikan kepada seluruh pelanggan sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara transparan kepada pihak ke 3.
- d. Koordinasi dengan Instansi Terkait/ Pemerintah Daerah dalam hal pengujian melalui Jejaring Laboratorium di daerah
- e. Peningkatan kompetensi personil Laboratorium dalam hal pengujian

Loka Payakumbuh

- a. Petugas aktif melakukan komunikasi terhadap pelaku usaha yang sudah diberikan pembinaan terhadap sarana produksi yang sudah ada.
- b. Pemahaman yang sama untuk petugas yang memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha.

Loka POM di Dhamasraya :

Petugas telah melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) untuk mendapatkan data sarana yang akan dilakukan pembinaan untuk sertifikasi. Petugas aktif melakukan komunikasi terhadap pelaku usaha untuk melakukan pembinaan baik secara langsung maupun via online.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Evaluasi dan Analisa terkait Tindak Lanjut atas rekomendasi Perbaikan dalam proses penerbitan rekomendasi/sertifikasi akan dilakukan beberapa strategi percepatan, diantara :

- a. Melakukan monitoring terhadap setiap permohonan izin edar. Menunjuk penanggung jawab yang akan melakukan evaluasi izin edar
- b. Petugas akan selalu memastikan sarana produksi telah siap untuk diaudit dalam rangka sertifikasi dengan melakukan beberapa kali fasilitasi ke sarana produksi.
- c. Petugas akan mengkonfirmasi kembali pelaku usaha dengan kesiapan dan komitmennya untuk memenuhi persyaratan audit sertifikasi.

- d. Petugas akan lebih meningkatkan komunikasi dengan pelaku usaha dan petugas Badan POM bila ada kendala terkait proses registrasi di aplikasi.
- e. Petugas sertifikasi dan pengujian lebih meningkatkan komunikasi terkait layanan sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel early warning system.
- f. Petugas memastikan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi GMP sarana produksi

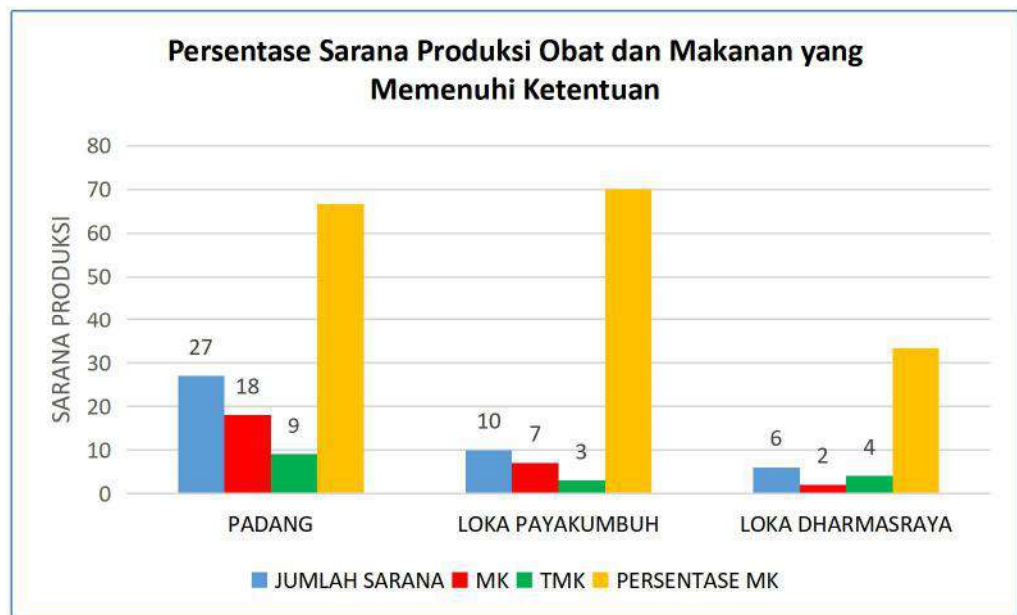
D. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49	62,79	128,14	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.11.Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Pada Triwulan I tahun 2020 target indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 49%. Sedangkan realisasi adalah 62,79 %, sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 128,14% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Realisasi dihitung terhadap jumlah sarana dengan kategori Memenuhi Ketentuan sebanyak 27 sarana dari 43 sarana yang diperiksa pada Triwulan I tahun 2021.



Gambar 3.21 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 62,79%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 49%, maka capaian sama yaitu sebesar 124,14%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Balai Besar POM di Padang

Sarana yang dikunjungi pada Triwulan I adalah Industri Pangan MD dan Industri Pangan Rumah Tangga (IRTP). Ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2021.

- Sarana Industri pangan MD sudah meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan penerapan aspek CPPOB.
- Sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan pada umumnya ditemukan Label Produk IRTP yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

Loka POM di Payakumbuh :

- Sarana produksi pangan terutama Industri pangan MD sudah meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan penerapan aspek CPPOB.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRT)
- b. Sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan pada umumnya tidak memenuhi ketentuan Label Produk IRTP dengan temuan bersifat Kritis

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan kegiatan : Membuat kajian daerah mana sarana produksi Obat dan Makanan tidak memenuhi ketentuan, lakukan bimbingan teknis kalau perlu pendampingan saat produksi serta pemberian penjelasan aturan yang dilanggar baik secara langsung saat pengawasan ataupun melalui surat rekomendasi tindak lanjut yang diberikan.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha industri pangan untuk menerapkan CPPOB secara konsisten.
- b. Memberikan pemahaman aspek CPPB-IRT pada pelaku usaha yang harus dilaksanakan oleh sarana produksi
- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman CPPB-IRT terhadap IRTP.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Memberikan bimbingan tentang CPPB-IRT pada saat kunjungan dan melalui penyuluhan kepada pelaku usaha
- b. Meningkatkan koordinasi dengan dinas kesehatan untuk turut serta memberikan pembinaan kepala pelaku usaha IRTP agar pelaku usaha memahami CPPB-IRT.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- a. Adanya dana alokasi khusus di sepuluh Kabupaten /Kota yang ada di Sumatera Barat bisa meningkatkan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/ kota terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha terutama pelaku usaha IRTP terkait cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), oleh pelaku

usaha, maka diberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tersebut terutama sarana produksi pangan, bimbingan dapat dilakukan secara langsung oleh petugas pada saat pengawasan sarana.

- b. Agar lebih meningkatkan koordinasi dengan dinas kesehatan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha terutama pelaku usaha IRTIP terkait cara produksi pangan yang baik.

E. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

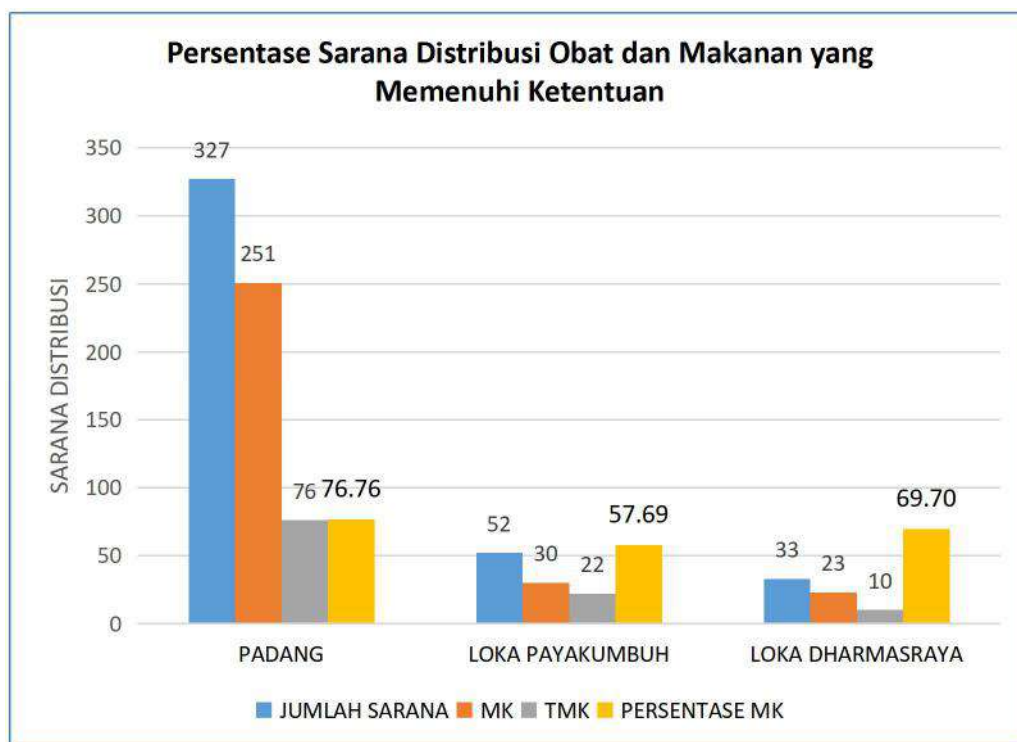
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	73,79	119,01	Sangat Baik

Tabel 3.12.Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Pada Triwulan I tahun 2021 target indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 62% dengan realisasi 73,79% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 119,01% dengan kriteria Sangat Baik.

Realisasi dihitung terhadap jumlah sarana dengan kategori Memenuhi Ketentuan sebanyak 304 sarana dari 412 sarana yang diperiksa pada Triwulan I tahun 2021.



Gambar 3.22 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 73,79%. bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 62%, maka capaian sama yaitu sebesar 119,01%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

Tercapainya kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

Peningkatan penerapan/pemenuhan CDOB dari sarana distribusi obat yang dilakukan di sarana PBF yang ada di kota Padang dikarenakan sudah dilengkapi sarana dan prasarana serta adanya kedisiplinan daripada penanggung jawab melaksanakan pendistribusian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peningkatan capaian ini juga disebabkan oleh perubahan definisi operasional penentuan sarana tidak memenuhi ketentuan yaitu sarana distribusi obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Sanyanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan

keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin. Untuk sarana distribusi obat yang diberi sanksi Peringatan sarana tersebut memenuhi ketentuan

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Rendahnya persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan disebabkan karena pemilihan sarana berdasarkan analisis resiko, menyebabkan sarana terpilih sebagian merupakan sarana dengan tingkat kepatuhan rendah.
- b. Sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan untuk sarana pelayanan kefarmasian adalah Apotek karena target sarana dipilih sarana dengan tingkat kepatuhan rendah.
- c. Untuk sarana distribusi obat dan makana yang tidak memenuhi ketentuan banyak ditemukan pada sarana distribusi kosmetik karena masih banyak ditemukan produk kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) pada sarana tersebut.

Loka POM di Dharmasraya :

Sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya dibagi atas dua wilayah kabupaten, yaitu Sijunjung dan Dharmasraya, kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah : SDM di loka terbatas, adanya kegiatan pelatihan yang menyebabkan tidak dapat melakukan kegiatan ke sarana, adanya kegiatan di luar perencanaan yang mendadak. Peningkatan capaian ini juga disebabkan oleh perubahan definisi operasional penentuan sarana tidak memenuhi ketentuan yaitu sarana distribusi obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Sanyanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin. Untuk sarana distribusi obat yang diberi sanksi Peringatan sarana tersebut memenuhi ketentuan. Bertambahnya persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan disebabkan karena beberapa sarana telah ada kepedulian dan adanya perbaikan. Untuk pemilihan sarana berdasarkan analisis resiko.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan kegiatan :

Buat kajian daerah mana sarana distribusi penyumbang TMK dan komoditinya apa, Selanjutnya dapat dilakukan bimtek secara langsung saat pengawasan ataupun bimtek secara klasikal ataupun daring. Selain itu surat rekomendasi tindak lanjut yang lebih

tajam dengan aturan pasal yang dilanggar serta sanksi hukum yang diterima jika dilanggar harus dituliskan dengan jelas, hal ini dilakukan baik untuk Balai maupun loka

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Terhadap sarana dilakukan monitoring terhadap perbaikan yang dilakukan sehingga untuk pemeriksaan berikutnya tidak ditemukan lagi ketidaksesuaian yang sama.
- b. Melakukan bimbingan teknis (BIMTEK) kepada pelaku usaha obat dan makanan terhadap peraturan pengelolaan obat dan makanan.

Loka POM di Dhamasraya :

- a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasin secara rutin
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam hal melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi obat, terutama sarana distribusi milik pemerintah.
- c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas Loka POM di Kab. Dharmasraya.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Untuk lebih meningkatkan capaian indikator ini telah diupayakan pemberian sanksi yang lebih tegas dan langsung ke sarana serta pengamanan produk obat dan makanan yang ditemukan di sarana bila ditemukan yang tidak ada izin edar/ tidak sesuai aturan. Juga diberikan peringatan dan peringatan keras untuk sarana yang temuannya berulang.

F. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Balai Besar POM di Padang berdasarkan 6 aspek meliputi : kegiatan pelayanan (30%), profesionalitas SDM (18%), Sarana Prasarana (15%), Sistem Informasi pelayanan Publik (SIPP) (15%), Konsultasi dan Pengaduan (15%) dan Inovasi (7%). Indeks Pelayanan Publik baru dapat diukur pada Triwulan III Tahun 2021

3.1.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama, namun realisasi indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE belum ada sehingga tidak dapat dihitung capaiannya. Hasil capaian rata-rata ketiga indikator tersebut adalah 145,00%. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	12%	120	Sangat Baik
2.	Jumlah desa pangan aman	10%	17%	170	Tidak dapat disimpulkan
3.	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10%	14,5%	145	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.13. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-V sebagai berikut :

A. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10%	12%	120,00	Sangat Baik

Tabel 3.14. Capaian Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2021 adalah 12% dari target sebesar 10% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 120% dengan kriteria Sangat Baik

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2020 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman adalah 12% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 100% atau 40 sekolah, maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 12%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Jadwal pelaksanaan advokasi disesuaikan dengan agenda pemerintahan daerah sehingga perwakilan setiap OPD terkait dapat hadir mengikuti advokasi. Sehingga didapatkan jadwal dua daerah di bulan Maret dan dua daerah di bulan April
- b. Advokasi PJAS telah dilaksanakan pada bulan maret di dua lokasi yaitu Kota Sawahlunto dan Kabupaten 50 Kota dengan menerapkan protokol kesehatan
- c. Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati) berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan keamanan pangan di daerah intervensi yang dipilih sebagai pilot project keamanan pangan

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Koordinasi dengan lintas sektor terus dilanjutkan sejak dilaksanakannya audiensi pada bulan Februari melalui Whatsapp dan telepon sehingga didapatkan jadwal advokasi yang disepakati bersama
- b. Pada advokasi dilaksanakan penandatanganan lembar komitmen mendukung penuh pelaksanaan intervensi keamanan pangan dari Balai Besar POM di Padang melalui program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah oleh Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati).
- c. Rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah advokasi dan sekolah calon intervensi disepakati bersama pada saat advokasi.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

- a. Pada saat audiensi dilakukan survey untuk melihat kondisi sekolah yang akan diintervensi kegiatan PJAS
- b. Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) akan menerbitkan SK Tim Keamanan Pangan untuk pelaksanaan dan pengawalan seluruh kegiatan intervensi Keamanan Pangan salah satunya adalah kegiatan PJAS
- c. Pelaksanaan kegiatan PJAS akan dilakukan sesuai juknis new normal yang telah ditetapkan Badan POM

B. Jumlah Desa Pangan Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah desa pangan aman	10%	17%	170	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.15.Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman TriwulanI Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi TriwulanI Tahun 2021

Realisasi Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang sampai dengan TriwulanI tahun 2021 adalah sebesar 17% sehingga capaian yang diperoleh pada TriwulanI tahun 2021 sebesar 170% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TriwulanI Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Jumlah desa pangan aman adalah 14,5% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 100%, atau 18 desa, maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 14,5%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Kegiatan Desa Pangan Aman baru dapat dilaksanakan setelah Kick Off Meeting dari pusat terlaksana.
- Koordinasi dengan lintas sektor terkait persiapan kegiatan terus dilakukan sehingga setelah Kick Off Meeting, kegiatan dapat langsung dilakukan..
- Adanya penunjukan penanggungjawab kegiatan untuk setiap Kabupaten/Kota yang akan diintervensi.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Jadwal kegiatan disusun fleksibel serta berkoordinasi dengan lintas sektor secara berkesinambungan sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan setelah Kick Off Meeting dari Pusat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2021.
- Telah dilakukan audiensi dengan lintas sektor terkait di Kabupaten/Kota yang akan diintervensi untuk mensosialisasikan kegiatan dan untuk menentukan desa, pasar dan sekolah yang akan diintervensi.

- c. Memberdayakan sumber daya yang ada sehingga kegiatan dapat dilakukan secara paralel

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

- a. SK Tim Terpadu pengawasan obat dan makanan diupayakan segera dibentuk oleh Kabupaten / Kota yang diintervensi
- b. Telah ditandatangani komitmen wali nagari agar kegiatan Desa Pangan Aman dilakukan secara berkelanjutan
- c. Kegiatan Advokasi kegiatan terpadu termasuk program desa pangan aman melibatkan OPD terkait termasuk Bappeda yang berkepentingan untuk pendanaan kegiatan desa pangan aman secara mandiri

C. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10%	14,5%	145%	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.16.Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan I Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2021 adalah sebesar 14,5% dari target sebesar 10% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I tahun 2021 sebesar 145% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya adalah 14,5% bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 100%, , maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 14,5%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Adanya dukungan dan perkuatan kerjasama dari Pimpinan Pemerintah Daerah dan pembinaan dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
- b. Pelaksanaan Audiensi Keamanan Pangan Terpadu sudah terlaksana sejak bulan

Februari 2021 dalam rangka persiapan pelaksanaan Advokasi Kegiatan Keamanan Pangan Terpadu.

- c. Pelaksanaan Advokasi Keamanan Pangan Terpadu sudah dapat terlaksana pada bulan Maret 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di era new normal.
- d. Kegiatan Survey Pasar sudah terlaksana mulai bulan Maret 2021 di dua titik pasar yang akan diintervensi.
- e. Penambahan SDM dibidang Informasi dan Komunikasi

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan 1 dan sudah dilaksanakan audiensi, advokasi hingga survey pasar yang akan diintervensi.
- b. Perkuatan Kerjasama lintas sektor dilakukan dengan koordinasi dengan Lintas sektor dan pemerintah kabupaten /Kota di Sumatera Barat
- c. Melakukan *Continuous Improvement* dibidang Infokom dengan Penataan Manajemen sumber daya manusia dan peningkatan akuntabilitas kinerja sebagai implementasi program Reformasi Birokrasi Pemerintah menuju *Good governance* dan *Clean Government*

5. Evaluasi dan Analisis TerkaitTindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

- a. Tahapan kegiatan Pasar Aman dari bahan berbahaya pada triwulan 1 dilakukan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar edukasi dapat tersampaikan dengan baik
- b. Komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pengawalan kegiatan keamanan pangan terpadu.

3.1.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 105,72%dengan kriteria Baik. Penjelasan

mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	22,01	88,04	Cukup
2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	24,68	123,40	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 3.17. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-VI sebagai berikut :

A. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

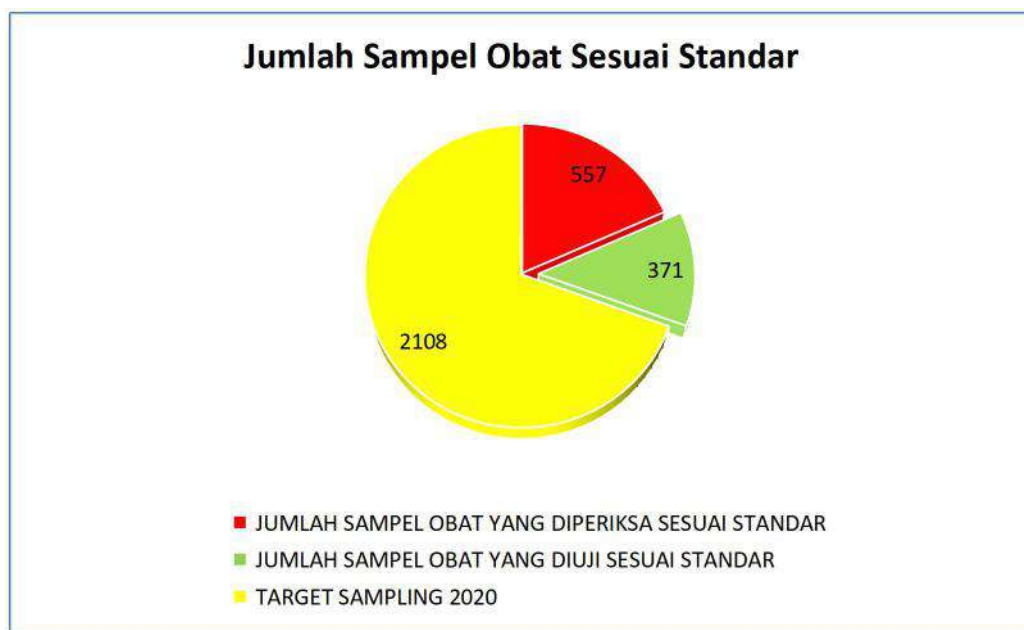
Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	22,01	88,04	Cukup

Tabel 3.18.Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2021 adalah 22,01 dari target sebesar 25% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I tahun 2021 sebesar 88,08% dengan kriteria Cukup



Gambar 3.23Jumlah Sampel Obat Sesuai Standar TriwulanI Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2021 adalah 22,01.%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 91% , maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 24,19%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Melakukan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling dan pengujian, dan sesuai SOP

Analisa: Substansi Pemeriksaan, Pengujian dan Bagian TU serta Loka POM pada awal tahun telah melakukan kesepakatan dalam perencanaan sampel yang akan disampling, jumlah dan waktu sampling. Pada TW1 ini masih ada sampel yang disampling belum sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian, dan jadwal sampel yang masuk ke Laboratorium ada yang belum sesuai perencanaan.

- b. Reagensia yang dibutuhkan tidak memadai

Analisa: Pengadaan reagensia yang diadakan untuk tahun 2021 belum dilakukan pada awal tahun, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan pengujian masih menggunakan pengadaan reagensia tahun 2020, tetapi tidak mencukupi sehingga perlu percepatan pengadaan reagensia oleh PPK.

- c. Sampel yang masuk ke laboratorium belum sesuai perencanaan

Analisa: Pada perencanaan sampel yang akan disampling tercantum jumlah sampel acak dan targetted yang dibuat setahun dan perbulan. Pada pelaksanaan sampling masih ada beberapa komoditi produk yang disampling tidak sesuai jumlah sampel yang direncanakan terutama sampel Acak.

- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengujian terhadap PUK dan Timeline

Analisa: Dalam pelaksanaan pengujian, penguji dan penyelia harus melakukan monitoring terhadap PUK dan timeline pengujian sesuai pedoman sampling dan pengujian. Pada TW1 ini semua sampel dapat dilakukan sesuai PUK dan timeline.

- e. Peningkatan kompetensi penguji

Analisa: Untuk memenuhi indikator target pengujian, maka kompetensi penguji dalam memahami pedoman sampling dan pengujian sangat diperlukan. Karena dengan pemahaman dan kompetensi penguji maka sampel dapat diuji sesuai standar.

- f. Koordinasi antara Substansi Pemeriksaan, Substansi Pengujian dan Bagian Tata Usaha

Analisa: Koordinasi antar Substansi sangat diperlukan terutama dalam hal sampling, karena terkadang pada saat ada reagensia, suku cadang dan alat laboratorium mengalami kendala maka perlu disepakati bersama untuk sampling pada saat tersebut. Dan juga terhadap penerimaan sampel di TPS maka koordinasi ketiga substansi sangat dibutuhkan sehingga pelaksanaan penerimaan sampel dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Peningkatan kemampuan ruang lingkup pengujian

Analisa: Dengan peningkatan ruang lingkup pengujian maka sampel yang diuji dengan parameter (PUK) yang diwajibkan pada pedoman sampling dan pengujian, akan dapat tercapai. Peningkatan ruang lingkup pengujian dengan cara melakukan pengujian yang belum masuk ruang lingkup, serta pelatihan terhadap parameter uji tersebut.

- b. Rapat evaluasi bulanan bersama antara Substansi pemeriksaan, dan substansi pengujian

Analisa: Rapat evaluasi ini untuk mensinkronkan jumlah sampel yang telah disampling dan yang masuk ke laboratorium dan juga kesesuaian terhadap kesepakatan yang telah dibuat di awal tahun

- c. Pengadaan baku pembanding secara mandiri

Analisa: Ketersediaan baku pembanding di P3OMN belum memadai sehingga P3OMN merekomendasikan agar Balai melakukan pengadaan baku pembanding secara mandiri, tapi tentu Balai harus menyediakan anggaran untuk pengadaannya. Pada TW1 ada beberapa baku pembanding yang diadakan secara mandiri.

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji di laboratorium

Analisa: Substansi Pengujian secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan PUK dan timeline sampel yang diuji sehingga pengujian yang dilakukan dapat dikelola dengan baik dan pada TW1 ini sampel yang diuji semuanya memenuhi PUK dan tidak melebihi timeline yang telah ditetapkan

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

- a. Rekomendasi perbaikan kinerja sebelumnya adalah pengadaan reagensia, baku pembanding dan pemeliharaan Alat Laboratorium.
- Evaluasi dan Analisa: Dari hasil evaluasi didapat bahwa reagensia yang digunakan pada awal tahun 2021 masih menggunakan sisa reagensia tahun 2020 dan jumlahnya tidak memadai. Untuk itu tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah percepatan pengadaan reagensia. Dan jumlah anggaran untuk pengadaan reagensia perlu ditambah karena ada beberapa reagensia yang tidak terpenuhi.
 - Untuk alat laboratorium yang sering rusak (contoh AAS) perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan sehingga alat laboratorium dapat terpelihara dengan baik, dan penambahan alat AAS yang baru, karena semua Laboratorium Kimia sejak tahun 2020 sudah menggunakan AAS untuk pengujian parameter Logam (PUK) yang berakibat frekwensi penggunaan AAS sangat tinggi.
 - Untuk baku pembanding, perlu penyediaan anggaran khusus untuk pengadaan baku pembanding yang tidak tersedia di P3OMN

B. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sampel makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	24,68	123,40	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.19.Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2021 adalah 24,68% dari target sebesar 20% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I tahun 2021 sebesar 123,40% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.



Gambar 3.24.Jumlah Sampel Makanan Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2021 adalah 24,68%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 87% , maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 28,37%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Melakukan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling dan pengujian, dan sesuai SOP

Analisa: Substansi Pemeriksaan, Pengujian dan Bagian TU serta Loka POM pada awal tahun telah melakukan kesepakatan dalam perencanaan sampel yang akan

disampling, jumlah dan waktu sampling. Pada TW1 ini masih ada sampel yang disampling belum sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian, dan jadwal sampel yang masuk ke Laboratorium ada yang belum sesuai perencanaan.

- b. Reagensia yang dibutuhkan tidak memadai

Analisa: Pengadaan reagensia yang diadakan untuk tahun 2021 belum dilakukan pada awal tahun, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan pengujian masih menggunakan pengadaan reagensia tahun 2020, tetapi tidak mencukupi sehingga perlu percepatan pengadaan reagensia oleh PPK.

- c. Sampel yang masuk ke laboratorium belum sesuai perencanaan

Analisa: Pada perencanaan sampel yang akan disampling tercantum jumlah sampel acak dan targetted yang dibuat pertahun dan perbulan. Pada pelaksanaan sampling masih ada beberapa komoditi produk yang disampling tidak sesuai jumlah sampel yang direncanakan terutama sampel Acak.

- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengujian terhadap PUK dan Timeline

Analisa: Dalam pelaksanaan pengujian, penguji dan penyelia harus melakukan monitoring terhadap PUK dan timeline pengujian sesuai pedoman sampling dan pengujian. Pada TW1 ini semua sampel dapat dilakukan sesuai PUK dan timeline.

- e. Peningkatan kompetensi penguji

Analisa: Untuk memenuhi indikator target pengujian, maka kompetensi penguji dalam memahami pedoman sampling dan pengujian sangat diperlukan. Karena dengan pemahaman dan kompetensi penguji maka sampel dapat diuji sesuai standar.

- f. Koordinasi antara Substansi Pemeriksaan, Substansi Pengujian dan Bagian Tata Usaha

Analisa: Koordinasi antar Substansi sangat diperlukan terutama dalam hal sampling, karena terkadang pada saat ada reagensia, suku cadang dan alat laboratorium mengalami kendala maka perlu disepakati bersama untuk sampling pada saat tersebut. Dan juga terhadap penerimaan sampel di TPS maka koordinasi ketiga substansi sangat dibutuhkan sehingga pelaksanaan penerimaan sampel dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Peningkatan kemampuan ruang lingkup pengujian

Analisa: Dengan peningkatan ruang lingkup pengujian maka sampel yang diuji dengan parameter (PUK) yang diwajibkan pada pedoman sampling dan pengujian, akan dapat tercapai. Peningkatan ruang lingkup pengujian dengan cara melakukan pengujian yang belum masuk ruang lingkup, serta pelatihan terhadap parameter uji tersebut.

- b. Rapat evaluasi bulanan bersama antara Substansi pemeriksaan, dan substansi pengujian

Analisa: Rapat evaluasi ini untuk mensinkronkan jumlah sampel yang telah disampling dan yang masuk ke laboratorium. Dan juga kesesuaian terhadap kesepakatan yang telah dibuat di awal tahun

- c. Pengadaan baku pembanding secara mandiri

Analisa: Ketersediaan baku pembanding di P3OMN belum memadai sehingga P3OMN merekomendasikan agar Balai melakukan pengadaan baku pembanding secara mandiri, tapi tentu Balai harus menyediakan anggaran untuk pengadaannya. Pada TW1 ada beberapa baku pembanding yang diadakan secara mandiri.

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji di laboratorium

Analisa: Substansi Pengujian secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan PUK dan timeline sampel yang diuji. Sehingga pengujian yang dilakukan dapat dikelola dengan baik. Dan pada TW1 ini sampel yang diuji semuanya memenuhi PUK dan tidak melebihi timeline yang telah ditetapkan

1. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

- a. Rekomendasi perbaikan kinerja sebelumnya adalah pengadaan reagensia, baku pembanding dan pemeliharaan Alat Laboratorium.

- Evaluasi dan Analisa: Dari hasil evaluasi didapat bahwa reagensia yang digunakan pada awal tahun 2021 masih menggunakan sisa reagensia tahun 2020 dan jumlahnya tidak memadai. Untuk itu tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah percepatan pengadaan reagensia. Dan jumlah anggaran untuk pengadaan reagensia perlu ditambah karena ada beberapa reagensia yang tidak terpenuhi.
- Dan untuk alat laboratorium yang sering rusak (contoh AAS) perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan sehingga alat laboratorium dapat terpelihara dengan baik, dan penambahan alat AAS yang baru, karena semua Laboratorium Kimia sejak tahun 2020 sudah menggunakan AAS

untuk pengujian parameter Logam (PUK) yang berakibat frekwensi penggunaan AAS sangat tinggi.

- Untuk baku pembanding, harus disediakan anggaran khusus untuk pengadaan baku pembanding yang tidak tersedia di P3 OMN
- Perlu Penambahan suku cadang alat laboratorium (kolom HPLC, PDA) yang memadai karena frekwensi pemakaian alat laboratorium yang sangat tinggi.

3.1.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

A. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	23,96	119,79	Sangat Baik

Tabel 3.20.Capaian Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Padang sampai dengan Triwulan I tahun 2021 adalah 23,96% dari target sebesar 20% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I tahun 2021 sebesar 119,79%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada Triwulan I tahun 2021 adalah 23,96%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 91% , maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 26,92%.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Penilaian tingkat keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara yaitu :

- a. Proses SPDP dengan bobot 15%
- b. Proses Tahap I dengan bobot 40%
- c. Proses P21 dengan bobot 30%
- d. Proses Tahap II dengan bobot 15%

Dalam periode Januari 2021 – Maret 2021, BBPOM di Padang melakukan penyelesaian *carry over* tahun 2020 yaitu 1 perkara pada proses P21, dan melakukan proses Tahap II terhadap perkara tahun 2020 (*carry over*) adalah sebanyak 2 perkara yang dilaksanakan pada bulan Januari 2021, juga telah melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan bidang obat dan makanan sebanyak 2 perkara yang ditingkatkan ke tahap penyidikan yaitu 1 perkara pada bulan Februari 2021 dan 1 perkara pada bulan Maret 2021. Dengan demikian terdapat perkara (3 perkara tahun 2020 dan 2 perkara tahun 2021) yang diproses oleh BBPOM di Padang pada periode Januari 2021 – Maret 2021.

Berdasarkan tren proses penyelesaian perkara dalam 3 (tiga) tahun terakhir untuk Waktu Penyelesaian Berkas Perkara (Tahap I) dibutuhkan rata-rata 1 bulan sedangkan waktu penyelesaian perkara hingga Tahap II dibutuhkan rata-rata 4 bulan. Untuk 1 (satu) perkara Tahun 2020 dihitung masih pada proses P21 hingga sekarang, perkara tersebut belum bisa dilaksanakan Tahap II dikarenakan tersangka melarikan diri dan saat ini telah diterbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh POLRI. Sedangkan 1 (satu) perkara tahun 2021 telah mencapai proses Tahap I (Penyelesaian Berkas Perkara) pada bulan Maret 2021 (selesai dalam waktu 1 bulan). Untuk 1 (satu) perkara lagi masih pada proses SPDP pada bulan Maret 2021. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pada periode Maret 2020 – Maret 2021 mempengaruhi pelaksanaan penindakan dan penyidikan Obat dan Makanan di Sumatera Barat.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Telah tercapainya target capaian kinerja pada TW I didukung oleh kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh petugas substansi penindakan pada BBPOM di Padang. Untuk pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut seperti komputer/laptop yang memiliki spesifikasi tinggi sehingga dapat memudahkan pencarian dan akses informasi peredaran obat dan makanan secara online serta dibutuhkan

pengembangan kompetensi petugas di bidang cyber crime. Untuk proses penyidikan dibutuhkan koordinasi yang baik dengan CJS/lintas sektor terkait sehingga memudahkan PPNS dalam menyelesaikan berkas perkara hingga pelaksanaan Tahap II.

Mengamati perkembangan perkara pada tahun 2020, pelaku kejahatan obat dan makanan telah memiliki taktik untuk melarikan diri saat proses penyidikan, sehingga ini menyebabkan pelaksanaan Tahap II tertunda dan menerbitkan DPO. Untuk mengatasi tidak terulangnya kasus tersebut diatas, maka PPNS menginstruksikan wajib lapor pada pelaku yang telah disangkakan.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya (TW I) meliputi:

- a. Memperhatikan dan menerapkan seluruh Aspek protocol kesehatan dalam melaksanakan penindakan dan penyidikan di lingkungan BBPOM di Padang
- b. Meningkatkan koordinasi secara virtual dengan seluruh pihak – *Criminal Justice System* (CJS) dalam rangka penerapan kebiasaan baru dalam melakukan kegiatan.
- c. Meningkatkan akses informasi yang dapat memberikan input untuk perkara obat dan makanan.

Dengan berakhirnya periode TW I 2021 dan menyisakan 9 (sembilan) bulan berjalan, untuk mencapai target telah disimulasikan bahwa minimal pencapaian proses penyelesaian perkara pada TW II 2021 adalah :

- 1 perkara pada proses SPDP
- 1 perkara pada proses Tahap I
- 2 perkara pada proses P21
- 2 perkara pada proses Tahap II

3.1.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG YANG OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utamayaitu :

- A. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang**
- B. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang**

Kedua indikator dari sasaran kegiatan terwujudnya organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang efektif di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang ini diukur pada akhir tahun 2021 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada Triwulan I Tahun 2021.

3.1.9 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IX

TERWUJUDNYA SDM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG YANG BERKINERJA OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

A. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang ini diukur pada akhir tahun 2020 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada Triwulan I Tahun 2021

3.1.10 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN X

MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, yaitu :

A. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Indikator Persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar diukur pada akhir tahun 2021 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada Triwulan I Tahun 2021

B. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang Optimal

Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang Optimal diukur pada akhir tahun 2021 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada Triwulan I Tahun 2021

3.1.11 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN XI

TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG SECARA AKUNTABEL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, namun untuk Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang belum ada nilainya sehingga tidak dapat diukur capaiannya.

A. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93	80	86,02	Cukup

Tabel 3.21.Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Triwulan I Tahun 2021

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2020

Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada Triwulan I tahun 2021 adalah 80% dari target efisien 93% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I tahun 2021 sebesar 86,02% dengan kriteria cukup.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 terhadap Target akhir Tahun 2021

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang triwulan I adalah 80%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 93% maka capaian terhadap target akhir tahun sama yaitu sebesar 86,02%.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Penyebab belum efisiennya penggunaan anggaran Balai Besar POM di Padang disebabkan karena adanya kegiatan yang belum dilaksanakan pada triwulan 1 sehingga penggunaan anggarannya tidak efisien

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Melakukan kegiatan sesuai perencanaan yang telah dibuat untuk memenuhi target output dan anggaran yang tersedia
- Melakukan evaluasi secara berkala oleh masing-masing bidang terhadap realisasi target dan anggaran yang telah digunakan.
- Melakukan revisi POK apabila ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan.

5. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- Membuat perencanaan kegiatan dalam bentuk POA fisik dan POA anggaran.
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan bila tidak jadi dilaksanakan dilakukan revisi anggaran

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang memperoleh anggaran sebesar Rp.45.920.455.000. Realisasi anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang triwulan Itahun 2020 adalah 11,99%.

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
Belanja Pegawai	17,874,800,000	3,440,341,126	19,25%
Belanja Barang	22,820,905,000	2,064,858,514	9,05%
Belanja Modal	5,224,750,000	0	0,00%
	45,920,455,000	5,505,199,640	11,99%

Tabel 3.22.Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja sampai TW I Tahun 2021

Pencapaian serapan ini karena adanya beberapa tindakan yang dilakukan, yaitu :

- Perencanaan dan penganggaran telah disusun berdasarkan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berlaku atau standar biaya yang telah ditetapkan pemerintah.
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan (POA) yang telah disepakati bersama.

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin (Triwulan) sehingga hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diantisipasi dan mendapatkan solusi dari hambatan dan permasalahan tersebut.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari 11 sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PER *OUTPUT* TRIWULAN I

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	VOLUME			ANGGARAN		
		TARGE T TW I	REALISAS I	CAPAIAN	PAGU TW I	REALISASI	CAPAIAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	$e=(d/c \times 100)$	<i>f</i>	<i>g</i>	$h=(g/f \times 100)$
1	Standarisasi Lembaga	0,25	0,2499	99,96%	600.378.300	225.982.685	37,64%
2	Koordinasi	1,25	0,531	42,48%	27.109.500	9.593.000	35,39%
3	Pelayanan Publik Lainnya	2,25	2,2492	99,96%	30.438.450	50.903.000	167,23%
4	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1587,5	178	11,21%	585.000.000	70.279.550	12,01%
5	Pemantauan Produk	0,25	0,2499	99,96%	312.197.400	219.417.489	70,28%
6	Komunikasi Publik	19	0,7497	3,95%	33.300.000	11.671.300	35,05%
7	Sarana Bidang Kesehatan	0,75	0,24	32,00%	783.712.500	0	0,00%
8	Perkara Hukum Badan Usaha	2,25	1	44,44%	124.476.750	85.207.500	68,45%
9	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	16	12,57	78,56%	296.607.150	46.303.000	15,61%
10	Pengawasan dan Pengendalian Produk	762	554	72,70%	253.018.650	148.617.294	58,74%
11	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	459,75	456	99,18%	330.033.750	250.233.500	19,9%
12	Layanan Perkantoran	0,25	0,3332	133,28%	3.511.795.800	4.387.366.372	124,93%
JUMLAH					6.888.068.250	5.505.574.690	79,93%

Tabel 3.23. Realisasi Anggaran per Output triwulan I Tahun 2021

2. CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021

Tabel 3.24. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis TW I Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	NAMA INDIKATOR	ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS					
		TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
<i>b</i>	<i>c</i>		<i>e</i>	$f=(e/dx100)$	<i>g</i>	<i>h</i>	$l=(h/gx100)$
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	85,81	102,64%	26.875.800	19.310.300	71,85
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	79,13	98,91%	5.379.750	5.594.890	104,00
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87,14	100,16%	63.179.850	87.573.664	138,61
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68	82,81	121,78%	29.582.550	30.980.440	104,73
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73	-	-	75.544.500	10.784.400	14,28
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87	-	-	15.219.225	25.451.500	167,23
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75	-	-	292.500.000	35.139.775	12,01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,50	-	-	67.500.000	112.311.750	168,50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	78,11	89,78%	16.181.400	12.805.000	79,13
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	41,23	58,9%	148.835.475	112.311.750	75,46
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100,53	118,27%	15.219.225	25.451.500	167,23
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49	62,79	128,14%	16.181.400	12.805.000	79,13

SASARAN STRATEGIS	NAMA INDIKATOR	ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS					
		TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	73,79	119,02%	148.835.475	112.311.750	75,46
	Indeks Pelayanan Publik	3,76	-	-	33.300.000	11.671.300	35,05
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,54	-	-	292.500.000	35.139.775	12,01
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10	12	120	103.224.150	919.200	0,89
	Jumlah desa pangan aman	10	17	170	79.318.200	45.383.800	57,22
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10	14,50	145	38.520.300	-	0,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	-	-	338.124.150	56.123.900	16,60
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	-	-	322.754.850	56.123.900	17,39
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	23,96	119,80	151.586.250	94.800.500	62,54
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92	-	-	39.783.000	18.575.945	46,69
	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	85	-	-	230.732.400	200.841.544	87,05
Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	77	-	-	41.682.000	-	0,00
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	-	-	604.462.500	-	0,00
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2,00	-	-	179.250.000	-	0,00
Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	45,00	-	-	2.681.220.000	3.440.341.126	128,31

SASARAN STRATEGIS	NAMA INDIKATOR	ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS					
		TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93	-	80	830.575.800	941.023.796	113,30

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Yang menjadi fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$: kegiatan efisien
 Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{IE}$$

Yang menjadi fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pengukuran efisiensi secara lengkap dapat dilihat pada tabel Nilai efisiensi masing-masing Indikator kinerja utama sebagai berikut :

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	1,43	0,43	92 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	0,95	-0,05	75%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0,72	1,80	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1,16	0,16	100 %
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	1,13	0,13	100 %
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	0,78	-0,22	75 %
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	0,71	-0,29	75 %
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1,62	0,62	90 %
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1,58	0,58	92 %
10	Indeks Pelayanan publik	-	-	-
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	-
12	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	134,76	133,76	75 %
13	Jumlah desa pangan aman	2,97	1,97	75 %
14	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0	0	-
15	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5,30	4,30	75 %
16	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	7,10	6,10	75 %
17	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1,92	0,92	88 %
18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	-	-
19	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-
	TOTAL	2,54	1,54	80 %

Tabel 3.25. Nilai efisiensi sasaran kegiatan Triwulan I Tahun 2021

BAB IV

PENUTUP



4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Interim Triwulan I Balai Besar POM di Padang Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tahun 2021. Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja ini tergambar target, capaian, tantangan, kendala sekaligus peluang dalam pencapaian kinerja 11 (sebelas) sasaran strategis yang diukur dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Padang.

Secara umum Balai Besar POM di Padang berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Balai Besar POM di Padang berhasil mencapai 3 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria baik, 2 sasaran kegiatan dengan kriteria sangat baik dan 6 sasaran kegiatan belum bisa dihitung karena capaiannya diukur pada akhir tahun.
2. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2021 berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebesar sebesar Rp.5,505,199,640,- (Lima milyar lima ratus lima juta seratus sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau 11,99% dari total pagu anggaran sebesar Rp.45,920,455,000 (Empat puluh lima milyar Sembilan ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
3. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat belum efisien dengan nilai efisiensi 80%

4.2 RENCANA PERBAIKAN KINERJA

Capaian kinerja dan realisasi anggaran dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang diperoleh Balai Besar POM di Padang Triwulan I Tahun 2020 sudah terlaksana dengan baik, namun masih diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap capaian tersebut, terutama untuk realisasi yang masih rendah. Hal ini diperlukan untuk untuk rencana perbaikan kinerja Balai Besar POM di Padang triwulan berikutnya. Rencana perbaikan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan capaian sasaran Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

dilakukan dengan Melakukan monitoring terhadap sebaran sampel perkabupaten/kota, sosialisasi yang berkesinambungan terhadap pengawas dalam melakukan inspeksi dan meningkatkan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk dapat melakukan pembinaan terhadap sarana yang berada di wilayahnya.

2. Peningkatan capaian sasaran Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilakukan dengan membuat suatu sistem kontrol terhadap tindak lanjut yang direspon oleh pemangku kepentingan, serta menunjuk petugas yang akan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan pelaku usaha terkait respon terhadap tindaklanjut, Mengoptimalkan kegiatan kajian terhadap daerah dimana sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan belum memenuhi ketentuan dan melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaku usaha yang mengajukan izin edar sehingga proses rekomendasi dapat dipercepat
3. Peningkatan capaian sasaran Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang antara lain dengan mendorong Bupati/Walikota terkait pembuatan SK Tim Terpaduan OPD yang mengawal kegiatan terpadu dengan Balai Besar POM di Padang, melaksanakan KIE di Medsos, ritel dan KIE oleh tokoh masyarakat.
4. Peningkatan capaian sasaran Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilakukan dengan percepatan pengadaan reagensia dan melakukan monitoring manajemen sampling dan pengujian,
5. Peningkatan capaian sasaran Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait antara lain dengan Membuat permohonan ke direktorat kriminal khusus Polda Sumbar untuk menerbitkan pencarian orang (DPO)
6. Peningkatan capaian sasaran Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel dilakukan dengan Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan melakukan revisi apabila kegiatan tidak jadi dilaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara berkesinambungan serta melaksanakan tindaklanjut yang efektif.

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI PADANG

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR PR.04.01.93.931.12.20.189 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2021.
- KESATU : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021;
- KEDUA : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PADANG,



FIRDAUS UMAR 4.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
NOMOR PR. 04.01.93.931.12.20.189 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	75

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	62
		6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,64
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		3. Jumlah desa pangan aman	18
		4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
		2. Persentase sampel makanan	87

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89
8	Terwujudnya organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang efektif	1. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92
		2. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	85
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	77
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	94
		2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Efisien (93%)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,


FIRDAUS UMAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus Umar, S.Si,Apt.

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Pihak Pertama

Padang, 22 Desember 2020

Firdaus Umar, S.Si., Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,64
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	87
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	85
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Efisien (93%)

Program

- Pengawas Obat dan Makanan
- Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 22.508.483.000
Rp 23.411.972.000

Kegiatan

- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp 22.508.483.000
Rp 23.411.972.000

Padang, 22 Desember 2020

Kepala Badan POM



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Kepala Balai Besar POM di Padang



Firdaus Umar, S.Si, Apt.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(RUPIAH)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	83.6	83.6	83.6	Rp 179.172.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	Rp 35.865.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87	87	87	Rp 421.199.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68	68	68	68	Rp 197.217.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				73	Rp 503.630.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				87	Rp 101.461.500
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				75	Rp 1.950.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				90,5	Rp 450.000.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana	87	87	87	87	Rp 107.876.000



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

BADAN POM

Jl. Gajah Mada PO Box 172 Padang - Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213, 445241
Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
	pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	produksi dan distribusi yang dilaksanakan					
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	Rp 992.236.500
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	Rp 101.461.500
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49	49	49	49	Rp 107.876.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	62	62	62	Rp 992.236.500
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				3,76	Rp.222.000.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,64	90,64	90,64	90,64	Rp 1.950.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	40%	70%	40	Rp 688.161.000
		Jumlah desa pangan aman	10%	40%	75%	18	Rp 528.788.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10%	40%	70%	6	Rp 256.802.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	40	75	91	Rp 2.254.161.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	35	70	87	Rp 2.151.699.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	30	50	89	Rp. 1.010.575.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
	Pengawas Obat dan Makanan di Padang						
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				92	Rp. 265.220.000
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				85	Rp. 1.538.216.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				77	Rp. 277.880.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				82	Rp. 4.029.750.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2	2	2	2	Rp. 1.195.000.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	45	50	60	94	Rp. 17.874.800.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Efisien (93 %)	Efisien (93 %)	Efisien (93 %)	Efisien (93 %)	Rp. 5.537.172.000

Padang, 4 Maret 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG



Firdaus Umar, S.Si., Apt.

**PENCAPAIAN KINERJA BESAR POM DI PADANG
TW I TAHUN 2021**

NO	NAMA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW I	PEMBILANG	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA
Stakeholder Perspective											
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	83,60	260	303	85,81	102,64	102,64	Baik
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	80,00	91	115	79,13	98,91	98,91	Baik
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	87,00	61	70	87,14	100,16	100,16	Baik
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	68,00	53	64	82,81	121,78	120,00	Tidak dapat disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS1:									105,87	105,43	Sangat baik
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Indeks	73,00	-	-	-	-	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS2:									-	-	
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	87,00	-	-	-	-	-	-
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	75,00	-	-	-	-	-	-
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks	90,50	-	-	-	-	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS3:								0,00	0,00		
Capaian Stakeholder Perspective									#VALUE!	#VALUE!	Baik

NO	NAMA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW I	PEMBILANG	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA
Internal Process Perspective											
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	9	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	%	87,00	100	191	78,11	89,78	89,78	Cukup
		10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	70,00	47	114	41,23	58,90	58,90	Cukup
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	%	85,00	377	375	100,53	118,27	118,27	Sangat baik
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	49,00	27	43	62,79	128,14	120,00	Tidak dapat disimpulkan
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	62,00	304	412	73,79	119,02	119,02	Sangat baik
		14	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,76	-	-	-	-	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS4: 115,68				102,82101,19Baik							
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	15	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Nilai	90,54	-	-	-	-	-	-
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Sekolah	10,00			12,00	120,00	120,00	Tidak dapat disimpulkan
		17	Jumlah desa pangan aman	Desa	10,00			17,00	170,00	120,00	Tidak dapat disimpulkan
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Pasar	10,00			14,50	145,00	120,00	Tidak dapat disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS5: 106,12				145,00120,00Sangat baik							
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	25,00	-	-	22,01	88,04	88,04	Cukup
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	20,00	-	-	24,68	123,40	120,00	Tidak dapat disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS6: 107,70				105,72104,02							
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	20,00			23,96	119,80	119,80	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS7: 106,67									119,80	119,80	Baik
Capaian Internal Process Perspective									118,34	111,25	Baik

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TW 1	PEMBILANG	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA	
Learning & Growth Perspective											
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	22	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks	92,00	-	-	-	-	-	
		23	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Nilai	85,00	-	-	-	-	-	
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS8: 94,27				0,000,00Baik							
SS9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks	77,00	-	-	-	-	-	
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS9: 111,36				--							
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	%	82,00	-	-	-	-	-	
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks	2,00	-	-	-	-	-	
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS10: 106,19				0,000,00Baik							
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Nilai	45,00	-	-	-	-		
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	%	93,00	-	-	-	80,0086,02	Cukup	
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS11: 104,35				80,0086,02Cukup							
Learning & Growth Perspective									#VALUE!	#VALUE!	Baik
NPS TOTAL									#VALUE!	#VALUE!	Baik



**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI PADANG
TAHUN 2021**

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target TW I	REALISASI TW I			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PERIODE SEBELUMNYA	PERBAIKAN/TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW I	RENCANA TINDAK LANJUT
					Pembilang	Penyebut	Realisasi						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	83,60%	260	303	85,81%	102,64%	Target tercapai	Ketajaman tim sampling dalam menemukan obat acak yang tidak memenuhi syarat harus ditingkatkan	Perencanaan sampling acak dengan mengatur sebaran yang merata untuk masing-masing kabupaten/kota, untuk meningkatkan keterwakilan uji mutu sampel yang ada di peredaran	Masih terbatasnya jenis zat aktif yang dapat di uji, menyebabkan tidak semua sampel obat yang banyak beredar dapat disampling dan diuji mutunya	1. Melakukan monitoring terhadap sebaran sampel perkabupaten/kota 2. Meningkatkan kemampuan uji laboratorium pengujian dengan mempersiapkan metoda uji, reagensia dan peralatan yang memadai
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	80,00%	91	115	79,13%	98,91%	Target belum tercapai	Perencanaan sampling acak yang tepat per kab/kota sangat diperlukan agar didapatkan sampel pangan yang tidak memenuhi syarat, mewakili jenis pangan beredar	Perencanaan sampling acak dengan mengatur sebaran yang merata untuk masing-masing kabupaten/kota, untuk meningkatkan keterwakilan uji mutu sampel yang ada di peredaran	Tidak tersedianya reagen di laboratorium secara lengkap, membuat tidak semua kategori sampling random dapat disampling pada TW I	1. Melakukan monitoring terhadap sebaran sampel perkabupaten/kota 2. Meningkatkan kemampuan uji laboratorium pengujian dengan mempersiapkan metoda uji, reagensia dan peralatan yang memadai
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,00%	87,00%	61	70	87,14%	100,16%	Target tercapai	Ketajaman tim sampling dan pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar disarana distribusi dan pelayanan kefarmasian harus selalu ditingkatkan	Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk-produk substandar yang masih beredar di masyarakat Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha/produsen dan distributor yang berada di wilayah Sumatera Barat agar dapat menjamin produk yang diproduksi dan didistribusikan aman dan bermutu	Tidak tersedianya reagensia dan metoda uji yang memadai untuk melakukan pengujian terhadap mutu produk yang diduga tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Padatnya jadwal petugas sehingga tidak ada kesempatan untuk mendapatkan bimbingan teknis	1. Memberikan bimbingan teknis kepada petugas pengawas 2. Memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha (produksi dan distribusi) 2. Meningkatkan kemampuan uji laboratorium pengujian dengan mempersiapkan metoda uji, reagensia dan peralatan yang memadai
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68,00%	68,00%	53	64	82,81%	121,78%	Target tercapai	Pengawasan dan pembinaan selalu ditingkatkan serta kerjasama dengan stakeholder sehingga makanan yang aman dan bermutu dapat selalu dicapai dan target dapat dinaikkan	Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha agar bisa memproduksi makanan yang aman dan bermutu	Pembinaan terhadap pelaku usaha mkanan terbatas, karena selain sarana industri makanan juga banyak jenis sarana ilain yang akan diawasi.	1. Komunikasi dengan Stakeholder terkait untuk dapat melakukan pembinaan terhadap sarana makanan yang berada di wilayahnya. 2. Meningkatkan kemampuan uji laboratorium pengujian dengan mempersiapkan metoda uji, reagensia dan peralatan yang memadai

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target TW I	REALISASI TW I			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PERIODE SEBELUMNYA	PERBAIKAN/TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW I	RENCANA TINDAK LANJUT
					Pembilang	Penyebut	Realisasi						
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73,00	73,00	-	-	-	#VALUE!		Perlu perencanaan yang matang baik untuk tingkat urban atau perkotaan pemberian KIE baik secara langsung ataupun melalui daring atau medsos; agar pengetahuan masyarakat meningkat untuk setiap strata pendidikan; sikap dan perilaku masyarakat tentang keamanan dan mutu obat dan makanan terpapar lebih tinggi. Untuk itu narasumber yang kompeten dan interaktif serta berita medsos yang menarik dalam bentuk infografis perlu semakin diperbanyak.	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	87,00	87,00	-	-	-	#VALUE!		Setiap selesai pelatihan terhadap pelaku usaha, agar selalu dijelaskan tentang maksud pertanyaan dan arti nilai yang akan dipilih, sehingga tidak ada bias dalam pengisian survei	-	-	-
		7 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan	75,00	75,00	-	-	-	#VALUE!		Kegiatan pengawasan yang dilakukan balai baik saat pra pasar atau pasca pasar selalu menyampaikan aturan yang berlaku jika ada temuan, diharapkan dengan	-	-	-
		8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,50	90,50	-	-	-	#VALUE!		Perlu disiapkan lebih banyak petugas layanan publik yang kompeten dan telah menerima pelatihan pelayanan prima sehingga kepuasan masyarakat terhadap layanan publik ini semakin meningkat, hal ini juga ditunjang dengan ketepatan dan kecepatan hasil uji, karena konsumen pelayanan publik banyak dari pihak ketiga yang mengujikan sampel.	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00%	87,00%	100	191	78,11%	89,78%	Target belum tercapai	Lakukan movev secara periodik, baik secara manual ataupun melalui SIPT agar capaian rekomendasi ini dapat tercapai. Hal ini dilakukan baik untuk Balai maupun Loka.	Movev tidak dapat dilakukan secara optimal karena movev masih dilakukan secara manual. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem movev yang lebih efektif melalui suatu aplikasi dimana data hasil pengawasan sudah terakumulasi secara sistem sehingga dapat langsung dipantau dan ditindaklanjuti	Padatnya kegiatan pada TW I berupa pengawasan pendistribusian vaksin covid-19 sehingga petugas kesulitan dalam membagi waktu untuk membuat surat TL. Serta movev yang dilakukan yang tidak berjalan optimal.	Membuat suatu aplikasi yang dapat membantu petugas dalam pembuatan surat tindak lanjut, serta aplikasi yang dapat digunakan untuk movev hasil pengawasan.
		10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00%	70,00%	47	114	41,23%	58,90%	Target belum tercapai	Selain movev secara periodik, juga harus dilakukan koordinasi yang intens baik terhadap pelaku usaha ataupun Dinas terkait dalam menanggapi surat rekomendasi yang dikirimkan. Komunikasi efektif akan meningkatkan capaian nilai persentase rekomendasi ini.	1. Membuat sistem kontrol terhadap tindak lanjut dari pelaku usaha 2. Menunjuk penanggung jawab yang akan melakukan koordinasi dengan pelaku usaha	Padatnya kegiatan pada TW I berupa pengawasan pendistribusian vaksin covid-19 sehingga koordinasi dengan pelaku usaha tidak dapat dilakukan dengan intens	Membuat suatu sistem kontrol terhadap tindak lanjut yang direpson oleh pemangku kepentingan, serta menunjuk petugas yang akan bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi dengan pelaku usaha terkait respon terhadap tindak lanjut

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target TW I	REALISASI TW I			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PERIODE SEBELUMNYA	PERBAIKAN/TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW I	RENCANA TINDAK LANJUT
					Pembilang	Penyebut	Realisasi						
		11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	85,00%	377	375	100,53%	118,27%	Target tercapai	Melaksanakan pembinaan dan audit dalam rangka sertifikasi sarana produksi terhadap pelaku usaha yang memasukkan permohonan registrasi izin edar. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap proses registrasi bagi pelaku usaha	1. Melakukan monitoring terhadap setiap permohonan izin edar 2. Menunjuk penanggung jawab yang akan melakukan evaluasi proses izin edar	Fasilitas uji laboratorium yang diberikan kepada pelaku usaha tidak maksimal disebabkan belum terpenuhinya metoda uji untuk parameter uji produk	Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaku usaha yang mengajukan izin edar sehingga proses rekomendasi dapat dipercepat
		12 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49,00%	49,00%	27	43	62,79%	128,14%	Target tercapai	Buat kajian daerah mana sarana produksi Obat dan Makanan tidak memenuhi ketentuan, lakukan bimbingan teknis kalau perlu pendampingan saat produksi serta pemberian penjelasan aturan yang dilanggar baik secara langsung saat pengawasan ataupun melalui surat rekomendasi tindak lanjut yang diberikan. Hal ini dilakukan baik untuk Balai dan Loka.	Pembahagian tim untuk melaksanakan kajian daerah mana sarana produksi Obat dan Makanan tidak memenuhi ketentuan	Kegiatan yang cukiup padat, sehingga belum terlaksananya pembuatan kajian sarana produksi Obat dan Makanan di daerah yang telah ditetapkan	Mengoptimalkan kegiatan dalam melakukan kajian terhadap daerah dimana sarana produksi Obat dan Makanan belum memenuhi ketentuan.
		13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62,00%	62,00%	304	412	73,79%	119,01%	Target tercapai	Buat kajian daerah mana sarana distribusi penyumbang TMK dan komoditinya apa, Selanjutnya dapat dilakukan bimtek secara langsung saat pengawasan ataupun bimtek secara klasikal ataupun daring. Selain itu surat rekomendasi tindak lanjut yang lebih tajam dengan aturan pasal yang dilanggar serta sanksi hukum yang diterima jika dilanggar harus dituliskan dengan jelas, hal ini dilakukan baik untuk Balai maupun loka	Pembahagian tim untuk melaksanakan kajian daerah mana sarana distribusi Obat dan Makanan tidak memenuhi ketentuan	Kegiatan yang cukiup padat, sehingga belum terlaksananya pembuatan kajian sarana distribusi di daerah yang telah ditetapkan	Mengoptimalkan kegiatan dalam melakukan kajian terhadap daerah dimana sarana distribusi Obat dan Makanan belum memenuhi ketentuan.
		14 Indeks Pelayanan Publik	3,76	0,00	-	-	-	#VALUE!		- Akan dibuat ruang layanan publik yang sesuai standar - Meningkatkan kerjasama antar bidang terutama bidang TU dan Infokom serta tim QMS untuk menyusun standar layanan publik	-	-	-
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	15 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,54	90,54	-	-	-	#VALUE!		- Mendampingi masyarakat untuk mengisi kuisioner - Memperbanyak kegiatan sosialisasi dengan masyarakat - Mengingatkan kembali masyarakat untuk mengisi kuisioner setelah melaksanakan kegiatan	a. Telah dilakukan sosialisasi/KIE kepada masyarakat secara tatap muka dan juga melalui medsos b. Telah dilakukan pendampingan pengisian kuisioner terkait peningkatan efektivitas KIE melalui link yang sudah tersedia	a. Belum banyak KIE yang bisa dilakukan termasuk KIE Tomas karena perubahan jumlah peserta dari 250 orang menjadi 500 orangsehingga memerlukan revisi anggaran dan penambahan pengadaan gimmick untuk peserta b. Sinyal di daerah yang tidak stabil	a. Melanjutkan melaksanakan KIE Medsos b. Melaksanakan KIE di Ritel c. Melaksanakan KIE bersama Tokoh Masyarakat pada TW II sd TW IV

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target TW I	REALISASI TW I			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PERIODE SEBELUMNYA	PERBAIKAN/TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW I	RENCANA TINDAK LANJUT
					Pembilang	Penyebut	Realisasi						
		16 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40,00	10%	#REF!	#REF!	12,00%	120,00%	Target tercapai	- Melaksanakan kegiatan PJAS sesuai juknis new normal yang telah dibuat BPOM - Melakukan survei ke sekolah , ada atau tidak memiliki kantin - Akan membuat SK Tim terpadu untuk OPD terkait yang dibuat oleh Bupati/Walikota agar OPD dapat lebih berkomitmen dalam mengawal kegiatan terpadu	a.Telah dilakukan audiensi dengan dinas pendidikan dan advokasi bersama pimpinan daerah dan OPD terkait b. Pada saat audiensi petugas juga telah melakukan survei kantin di kab/kota yang akan diintervensi dan pada saat advokasi juga telah disampaikan kepada Pimpinan Daerah agar Pimpinan Daerah dapat membuat SK Tim terpadu yang terdiri dari OPD di daerah untuk dapat melakukan pengawalan terhadap kegiatan PJAS	a. Masih belum tersedianya kantin yang menyediakan makanan untuk anak sekolah pada masa pandemi ini karena siswa hanya belajar beberapa jam saja. b. Kurangnya komitmen Pemda dalam mengawal kegiatan terpadu ini. c. Kegiatan baru dapat terlaksana setelah Kick Off Meeting dilaksanakan di Pusat	a. Akan melaksanakan sosialisasi PJAS secara daring dan Bimtek Keamanan PJAS secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan b. BBPOM di Padang akan membuat surat kepada Bupati/Walikota terkait pembuatan SK Tim Terpadu dan OPD yang mengawal kegiatan bersama-sama dengan BPOM di Padang.
		17 Jumlah desa pangan aman	18,00	10%	#REF!	#REF!	17,00%	170,00%	Target tercapai	- Akan membuat SK Tim terpadu untuk OPD terkait yang dibuat oleh Bupati/Walikota agar OPD dapat lebih berkomitmen dalam mengawal kegiatan terpadu - Menyarankan kepada desa untuk menyusun kembali anggaran kegiatan Keamanan Pangan di desa untuk tahun berikutnya - Mengundang kembali Bappeda pada kegiatan advokasi tahun berikutnya agar bisa lebih memahami kegiatan terpadu di BPOM	a..Telah dilakukan audiensi dengan dinas pendidikan dan advokasi bersama pimpinan daerah dan OPD terkait b. SK Tim Terpadu pengawasan obat dan makanan diupayakan segera dibentuk oleh Kabupaten / Kota yang diintervensi c.Telah ditandatangani komitmen wali nagari agar kegiatan Desa Pangan Aman dilakukan secara berkelanjutan c.Kegiatan Advokasi kegiatan terpadu termasuk program desa pangan aman melibatkan OPD terkait termasuk Bappeda yang berkepentingan untuk pendanaan kegiatan desa pangan aman secara mandiri	a. Kurangnya komitmen Pemda dalam mengawal kegiatan terpadu ini. b. Kegiatan baru dapat terlaksana setelah Kick Off Meeting dilaksanakan di Pusat	a. BBPOM di Padang akan membuat surat kepada Bupati/Walikota terkait pembuatan SK Tim Terpadu dan OPD yang mengawal kegiatan bersama-sama dengan BPOM di Padang. b. Setelah advokasi lintas sektor terlaksana, pada triwulan 2 akan dilaksanakan pelatihan korlap dan KKPD, dilanjutkan dengan bimtek komunitas, fasilitasi tahap 1 dan intensifikasi pre intervensi secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan
		18 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6,00	10%	#REF!	#REF!	14,50%	145,00%	Target tercapai	- Akan membuat SK Tim terpadu untuk OPD terkait yang dibuat oleh Bupati/Walikota agar OPD dapat lebih berkomitmen dalam mengawal kegiatan terpadu - Mengajak OPD untuk bersama-sama mengintervensi dan mengawasi kegiatan Pasar Aman dan Bahan Berbahaya	a.Tahapan kegiatan Pasar Aman dari bahan berbahaya pada triwulan 1 dilakukan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar edukasi dapat tersampaikan dengan baik b.Telah dilakukan audiensi dengan dinas perdagangan dan advokasi bersama pimpinan daerah dan OPD terkait b. SK Tim Terpadu pengawasan obat dan makanan diupayakan segera dibentuk oleh Kabupaten / Kota yang diintervensi	a. Kurangnya komitmen Pemda dalam mengawal kegiatan terpadu ini. b. Kegiatan baru dapat terlaksana setelah Kick Off Meeting dilaksanakan di Pusat	a. b. Kegiatan baru dapat terlaksana setelah Kick Off Meeting dilaksanakan di Pusat b. Mengatur jadwal untuk melaksanakan Bimtek petugas pasar dan Movev pasar tahap 1 secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91,00%	25,00%	-	-	22,01%	88,04%	Target belum tercapai	Pengadaan reagensia, alat laboratorium dan baku pembanding	1. Perlu penambahan anggaran untuk pengadaan reagensia dan baku pembanding 2. Pengadaan reagensia di awal tahun, 3. Penambahan anggaran pemeliharaan alat laboratorium 4. Penambahan Alat AAS	Keterbatasan reagensia di gudang,	1. Percepatan pengadaan reagensia dan penambahan anggaran pengadaan 2. Monitoring manajemen sampling dan pengujian,

NO	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2021	Target TW I	REALISASI TW I			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PERIODE SEBELUMNYA	PERBAIKAN/TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW I	RENCANA TINDAK LANJUT
						Pembilang	Penyebut	Realisasi						
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	87,00%	20,00%	-	-	24,68%	123,40%	Target tercapai	Pengadaan reagensia, alat laboratorium dan baku pembanding	1. Perlu penambahan anggaran untuk pengadaan reagensia dan baku pembanding 2. Pengadaan reagensia di awal tahun, 3. Penambahan anggran pemeliharaan alat laboratorium 4. Penambahan Alat AAS	Keterbatasan reagensia di gudang	1. Percepatan pengadaan reagensia dan penambahan anggran 2. Monitoring manajemen sampling dan pengujian,
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89,00%	20,00%	-	-	23,96%	119,79%	Target tercapai	Telah diadakan refocusing anggaran, sehingga target perkara menjadi turun, untuk mencapai realisasi tingkat keberhasilan penindakan diperlukan perencanaan kegiatan penindakan yang efektif.	Merencanakan perkara yang dapat diprojustisia yang disesuaikan dengan anggaran	Pada tahap proses penyidikan adanya perkara yang tersangkanya tidak bisa dihadirkan ke JPU (Tersangka melarikan diri)	Membuat permohonan ke direktorat kriminal khusus Polda Sumbar untuk menerbitkan pencarian orang (DPO)
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB UPT	92,00	0,00	-	-	-	#VALUE!		Masing masing Zone agar membuat perencanaan yang lebih riil dengan bukti fisik yang update, terutama zona penyumbang persentase nilai RB yang besar yaitu Penataan SDM (10 %) dan penguatan pengawasan 15 %.Lakukan rapat berkala untuk monitoring capaian kegiatan tiap zone. Komitmen semua pegawai dan semua tim RB dan pimpinan UPT sa ngat menentukan kesuksesan capaian nilai RB ini.	-	-	-
		23	Nilai AKIP UPT	85,00	0,00	-	-	-	#VALUE!		Melakukan rapat evaluasi triwulan terhadap capaian kinerja dan melaksanakan langkah-langkah perbaikan terhdap target yang belum tercapai	-	-	-
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77,00	0,00	-	-	-	#VALUE!		Peningkatan kompetensi terhadap semua pegawai dan program tugas belajar dan izin belajar	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data	25	Persentase pemenuhan laboratorium	82,00%	0,00%	-	-	-	#VALUE!		Menyesuakaann dengan standar baru	-	-	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target TW I	REALISASI TW I			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PERIODE SEBELUMNYA	PERBAIKAN/TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW I	RENCANA TINDAK LANJUT
					Pembilang	Penyebut	Realisasi						
	dan informasi pengawasan obat dan makanan	26 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,00	2,00	-	-	-	#VALUE!		a. Tim TI BBPOM di Padang aktif dalam menginformasikan, melakukan sosialisasi serta melakukan pemantauan kepada pimpinan dan pegawai untuk memanfaatkan seluruh aplikasi yang sudah dibangun dalam mengelola data dan informasi. b. Pimpinan dan pegawai BBPOM di Padang sudah aktif dalam memanfaatkan teknologi ataupun aplikasi yang tersedia. c. Tim TI BBPOM aktif berkoordinasi dengan pengguna aplikasi maupun dengan tim Pusdatin BPOM jika terjadi kendala dalam penggunaan aplikasi ataupun teknologi lainnya, serta cepat dalam penanganan masalah terkait TIK.	-	-	-
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	27 Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,00	45,00	-	-	#REF!	#REF!		Peningkatan pengelolaan anggaran dan tertib administrasi keuangan serta perencanaan kegiatan yang baik sehingga realisasi sesuai dengan perencanaan dan monitoring evaluasi digunakan untuk perbaikan.	-	-	-
		28 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	93,00	93,00	-	-	80,00%	86,02%	Target belum tercapai	Optimalisasi penyerapan anggaran dan peningkatan capaian kinerja dengan perencanaan yang baik dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian sebelumnya	Telah dilakukan perencanaan Kegiatan dalam bentuk POA fisik dan anggaran	Pada awal tahun masih belum banyak kegiatan yang dilaksanakan dan anggaran terserap sedikit	Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan melakukan revisi apabila kegiatan tidak jadi dilaksanakan

Mengetahui
Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Padang

Firdaus Umar, S.Si, Apt

PERHITUNGAN EFISIENSI BALAI BESAR POM DI PADANG TRIWULAN I 2021

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	85,81	102,64	26.875.800	19.310.300	71,85	1,43	0,43	92 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	79,13	98,91	5.379.750	5.594.890	104,00	0,95	-0,05	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87,14	100,16	63.179.850	87.573.664	138,61	0,72	1,80	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68	82,81	121,78	29.582.550	30.980.440	104,73	1,16	0,16	100 %
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	78,11	89,78	16.181.400	12.805.000	79,13	1,13	0,13	100 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	41,23	58,90	148.835.475	112.311.750	75,46	0,78	-0,22	75 %
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100,53	118,27	15.219.225	25.451.500	167,23	0,71	-0,29	75 %
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49	62,79	128,14	16.181.400	12.805.000	79,13	1,62	0,62	90 %
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	73,79	119,02	148.835.475	112.311.750	75,46	1,58	0,58	92 %
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10	12	120,00	103.224.150	919.200	0,89	134,76	133,76	75 %
17	Jumlah desa pangan aman	10	17	170,00	79.318.200	45.383.800	57,22	2,97	1,97	75 %
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10	14,5	145,00	38.520.300	0	0,00	0,00	0,00	-
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	22,01	88,04	338.124.150	56.123.900	16,60	5,30	4,30	75 %
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	24,68	123,40	322.754.850	56.123.900	17,39	7,10	6,10	75 %
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	23,96	119,80	151.586.250	94.800.500	62,54	1,92	0,92	88 %
TOTAL				113,59	1.503.798.825	672.495.594	44,72	2,54	1,54	80 %

Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Padang



Firdaus Umar, S.Si, Apt
19740205 200003 1 001